



RENSTRA 20²⁵₂₉

RENCANA STRATEGIS

dinas
**PEKERJAAN UMUM &
TATA RUANG**
kabupaten gresik

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 2025 – 2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memuat capaian dari target periode sebelumnya, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun merupakan dasar dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, antara lain RENJA, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan LKjIP. Dengan demikian, atas izin Allah SWT, serta segala upaya dari seluruh stakeholders terkait kami mengharapkan target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini dapat tercapai sehingga dapat mensukseskan program pembangunan Bupati Kabupaten Gresik.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



DHIANNITA TRI ASTUTI, ST, M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	17
2.1.5 Dukungan Stakeholder Terkait Perangkat Daerah	21
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.2.2 Isu Strategi.....	27
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 30
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029.....	30
3.2 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029.....	34
3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029.....	36
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
4.1 Uraian Program	42
4.2 Uraian Kegiatan	55
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	87
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029.....	92
4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis DPUTR.....	92
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPUTR	97
4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra DPUTR.....	98
 BAB V PENUTUP.....	 100
Penutup.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Jumlah Pegawai.....	13
Tabel 2. 2	SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2. 3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2. 4	Permasalahan Pembangunan Prioritas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.....	26
Tabel 2.5	Keselarasan Isu Strategis Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029	28
Tabel 3. 1	Tabel Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.	31
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2030.....	32
Tabel 3. 3	Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 - 2029	34
Tabel 3. 4	Perumusan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	35
Tabel 3. 5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	37
Tabel 4. 1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUTR.....	44
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUTR Tahun 2025-2030	56
Tabel 4. 3	Daftar subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2030.....	84
Tabel 4. 4	Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	87
Tabel 4. 5	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	88
Tabel 4. 6	Tabel Sub Kegiatan Dukungan Proyek Strategis Nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	92
Tabel 4. 7	Tabel Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	93
Tabel 4. 8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DPUTR Tahun 2025-2029	97
Tabel 4. 9	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra DPUTR Tahun 2025-2029	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	13
Gambar 2. 2 Tampilan Website Go – PUTAR	18
Gambar 2. 3 Kolaborasi Dinas PUTR dengan Masyarakat.....	21
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	36
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra ..	36

LAMPIRAN

Lampiran 1. Manual Indikator Kinerja Sasaran.....	101
Lampiran 2. Manual Indikator Kinerja Program Kegiatan Dan Subkegiatan	103



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi pembangunan Kabupaten Gresik didalam RPJMD 2025 – 2029, yaitu Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata, diperlukan perencanaan yang matang, terukur, dan terarah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUTR.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dasar, penataan ruang wilayah, serta pengelolaan sumber daya air dan urusan pertanahan, Dinas PUTR bertanggung jawab dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah dengan kebutuhan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki keterkaitan dan memperhatikan dokumen lain, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah

Adapun tujuan disusunnya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.

4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menyajikan data – data dan informasi terkait peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dan pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 – 2024 dan data – data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup yang terkait dengan Perangkat Daerah. Selain itu juga mengidentifikasi serta menyajikan permasalahan dan isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi uraian tinjauan terhadap perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam merencanakan rencana kerja yang dapat diukur untuk jangka

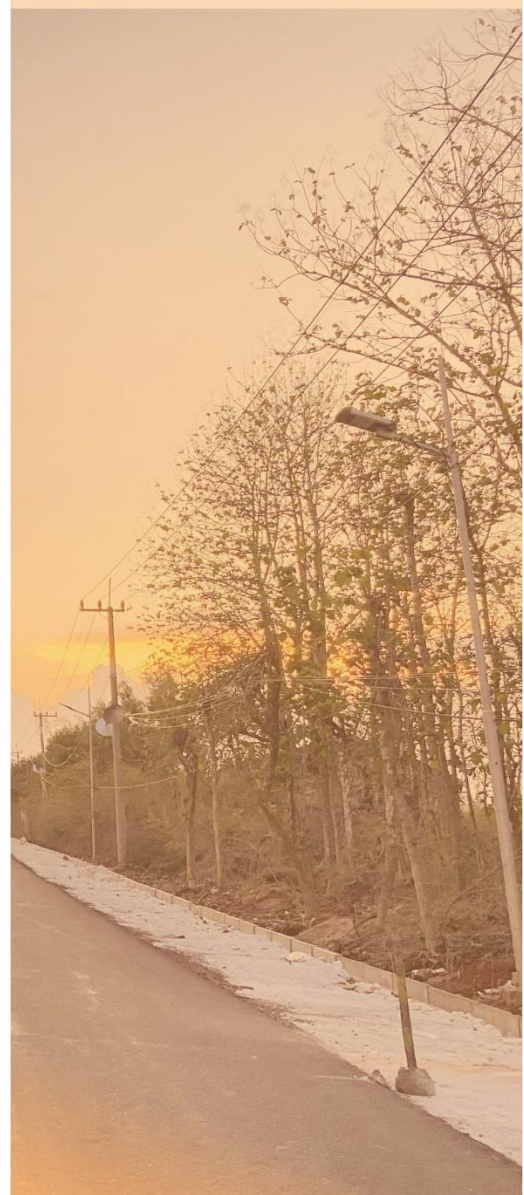
waktu 5 (lima) tahun dengan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah / upaya strategis yang akan dilakukan berdasarkan arah kebijakan dengan menyesuaikan kebutuhan pengembangan daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Pertanahan terdiri dari Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Ruang, Pertanahan dan Sekretariat serta 3 (Tiga) UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan, Utara, dan Bawean

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 guna memberikan gambaran tentang melaksanakan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024:

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabankan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
5. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
6. Pengkoordinasian bidang – bidang di lingkup dinas;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing – masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang sumber daya air;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang sumber daya air;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi dan manajemen mutu program di bidang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya air;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang program sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sumber daya air; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina marga. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;
- 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang bina marga;
- 4. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang bina marga;
- 5. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- 6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengujian konstruksi pelaksanaan serta program lain di bidang bina marga;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang serta utilitas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan program di bidang tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang tata ruang;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis di bidang pertanahan;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

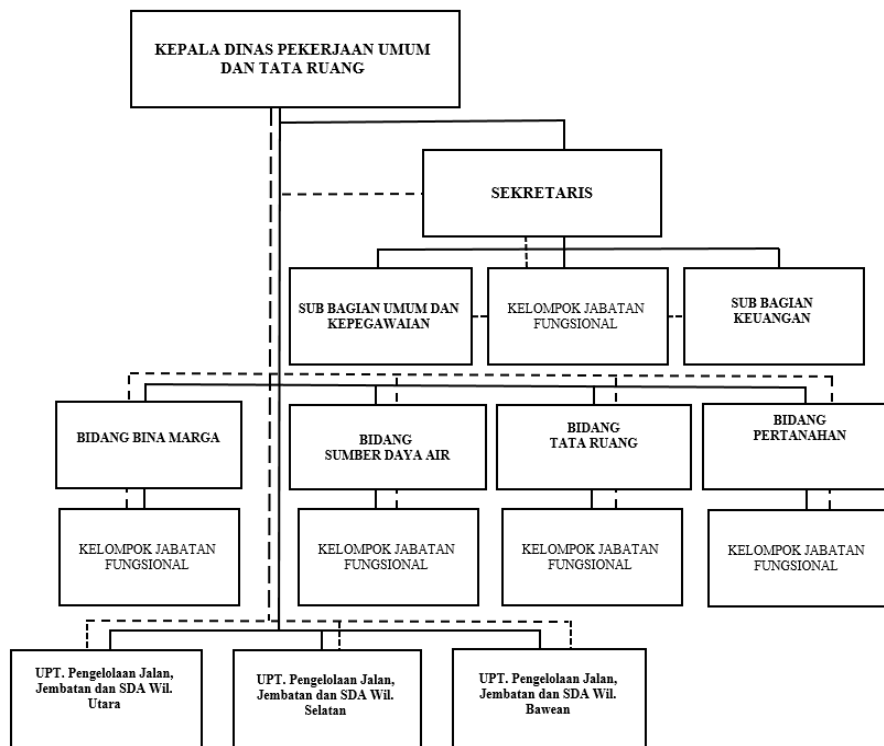
G. Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pada permodelan ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

H. UPT

Dinas dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai UPT yang terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi : Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;
2. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Wilayah Utara di Kecamatan Dukun yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Dukun, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;
3. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;



Gambar 2. 1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	4
4.	Jabatan Fungsional Teknis	26
5.	Jabatan Fungsional Umum	77
6.	PPPK	8
7.	Tenaga Kantor (Non PNS)	34
8.	Tenaga Lapangan (Non PNS)	193
9.	Tenaga Keamanan dan Kebersihan (Non PNS)	11
TOTAL		358

Sumber: Data Pegawai Dinas PUTR September 2025

Tabel 2. 2 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS										PPPK	JUMLAH	JK	
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a			L	P
1	KEPALA DINAS	1											1		1
2	SEKRETARIAT	1		5		5	5	1	3	1			23	10	12
3	BINA MARGA		1	2		4	17	2	2		2	1	35	26	6
4	SUMBER DAYA AIR		1	5		1	9	1	1	1		2	21	14	5
5	TATA RUANG		1	2		5	8						18	7	11
6	PERTANAHAN						2	3	2			2	12	5	5
7	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH UTARA									2		3	2	2	
8	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN		1				1				1		3	3	
9	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN			1		1	1				1		4	4	
	JUMLAH	2	4	15	-	16	43	7	8	4	4	8	111	71	40

Sumber: Data Pegawai Dinas PUTR, September 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta pengelolaan ruang wilayah yang terencana dan berkelanjutan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPUTR mencerminkan sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur dan penataan ruang. Melalui berbagai program strategis dan kegiatan operasional, Dinas PUTR telah berhasil menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam sektor pekerjaan umum, realisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi menunjukkan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran konektivitas antar wilayah serta peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan pertanian.

Dinas PUTR juga berhasil menyelenggarakan pelayanan perencanaan tata ruang secara transparan dan partisipatif. Selain itu, peningkatan layanan perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan secara digital untuk mempercepat proses dan meminimalkan potensi pelanggaran tata ruang.

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas PUTR menunjukkan tren positif, yang ditunjukkan melalui tingkat kepuasan masyarakat, efektivitas program pembangunan, dan capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar telah melampaui target.



Tabel 2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	TUJUAN DINAS PUTR	SASARAN DINAS PUTR	IKD	IKK LPPD	TARGET					REALISASI					RATIO				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan		✓	73,70%	74,00%	70,47%	74,16%	76,20%	73,81%	74,29%	74,60%	74,73%	70,74%	100,15%	100,39%	106%	100,80%	92,84%
2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik,	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air			-	64,71%	65,20%	65,36%	65,73%	-	64,59%	65,01%	65,36%	65,86%	-	99,82%	99,70%	100%	100,20%
3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	peningkatan produktivitas pertanian dan sector ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air		✓	51,23%	44,81%	46,19%	47,67%	49,27%	43,54%	47,84%	47,89%	49,02%	49,85%	84,99%	106,76%	104%	102,80%	101,18%
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdayasaing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur		✓	95%	95%	95%	98%	100%	100%	94,79%	99,11%	274,44%	108,55%	105,26%	99,78%	104%	280%	108,55%
5	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdayasaing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan			-	-	100%	100%	100%	-	80%	80%	50%	-	-	80%	80%	50%	50%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan Dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan salah satu Dinas yang memberikan jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Adapun Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencakup berbagai aspek, antara lain:

A. Masyarakat Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terutama dalam pelayanan penggunaan jalan, menyediakan infrastruktur pencegahan banjir, serta pelayanan berkaitan dengan penataan ruang. Masyarakat umum yang dimaksud antara lain:

1). Layanan Perizinan Berkegiatan dan Perapian Kabel

Layanan Perizinan Berkegiatan dan Perapian Kabel yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bidang Tata Ruang. Layanan Perizinan Kegiatan dapat diakses via online yang terdiri dari OSS dan GOPUTAR. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan melalui OSS tersebut ditujukan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Sedangkan, Website GO-PUTAR yang merupakan Website Pengelolaan Pengendalian Utilitas dan Tata Ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pengurusan pelayanan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang (SKIR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR Non Berusaha, dan pengurusan Peil Banjir. Kedua layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Berusaha, Non Berusaha, Developer serta Perusahaan.



Gambar 2. 2 Tampilan Website Go – PUTAR

Selain itu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik juga memberikan pelayanan SEKARDADU (**SE**lasi **KegiatAn** **peRapihan** **kabel** **uDAra** **terpaDU**). Kegiatan ini berkaitan dengan infrastruktur kabel udara yang terpasang di Wilayah Kabupaten Gresik yang seringkali tidak teratur sehingga menimbulkan kesan kumuh dan mengganggu estetika kota serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Keberadaan kabel yang tidak rapi juga mempersulit perawatan, meningkatkan risiko kebakaran, dan mengurangi efisiensi pengelolaan infrastruktur jaringan.

Kegiatan SEKARDADU ini merupakan kegiatan inovatif berupa program rutin yang terkoordinasi untuk menata kabel udara di wilayah perkotaan dengan melibatkan Kerjasama antar OPD (Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Desa) dan seluruh provider di kabupaten gresik untuk melakukan penataan kabel udara. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, penyedia layanan telekomunikasi dan masyarakat pengguna.

2). Layanan Irigasi dan Penanganan Banjir

Pelayanan Irigasi dan Penanganan Banjir yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik diampu oleh Bidang Sumber Daya Air. Layanan Irigasi dan Penanganan Banjir ini melibatkan beberapa komponen kelompok seperti HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), KOMIR (Komisi Irigasi), Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli

Waduk, serta masyarakat terdampak banjir ketika terjadi luapan Sungai Bengawan Solo.

Pembinaan dan Sosialisasi HIPPA ini berkolaborasi dengan KOMIR dalam upaya mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi para petani dalam pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi. Pembinaan HIPPA juga didukung oleh Keputusan Bupati Gresik Nomor : 611/1155/HK/437.12/2024 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Gresik Tahun 2024 – 2027 dan Kebijakan Pemerintah lainnya melalui pembentukan KOMIR (Komisi Irigasi). Pembentukan KOMIR ini dimaksudkan dapat berjalan berdampingan dengan HIPPA untuk mewujudkan pengelolaan irigasi yang tertib, terpadu dan berkelanjutan. KOMIR berfungsi untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan jaringan irigasi yang sudah dibangun Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air irigasi, serta menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi daerah aliran sungai.

Pelayanan penanganan banjir salah satunya melalui pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai (KPS) dan Komunitas Peduli Waduk (KPW) sebagai upaya pencegahan banjir di wilayah hulu sampai dengan hilir sungai. Kondisi penurunan fungsi sungai apabila terus dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, sehingga dalam penanganan banjir ini tidak bisa jika hanya dari Pemerintah saja akan tetapi perlu adanya dukungan dari masyarakat. KPS dan KPW dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai dan waduk serta menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dan waduk, maka kualitas hidup masyarakat khususnya di sekitar sungai dan waduk dapat meningkat.



3). Layanan Perbaikan Jalan

Layanan Perbaikan Jalan merupakan layanan masyarakat yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk melaporkan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Gresik dengan kondisi rusak, berlubang atau berbahaya dengan mudah dan cepat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui call center Gresik AKAS 112, Nomor layanan pengaduan Dinas PUTR Kabupaten Gresik dan dapat juga melalui akun social media seperti Instagram. Layanan Perbaikan Jalan tersebut diselenggarakan oleh Bidang Bina Marga dengan TIM URC (Unit Reaksi Cepat) pemeliharaan jalan, Tim URC dibentuk untuk :

- a). Memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infratraktur jalan raya yang meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).
- b). Untuk memperbaiki, rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan secara cepat.



Dinas PUTR juga berkolaborasi bersama masyarakat, salah satunya dengan mengukuhkan Komunitas Peduli Jalan dimana komunitas tersebut bertugas melaporkan pada Dinas PUTR Gresik jika ada kerusakan jalan dan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan termasuk RUMIJA (Ruang Milik Jalan) agar pelayanan Dinas PUTR Gresik kepada masyarakat dapat semakin optimal, yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi, memajukan ketahanan pangan, dan sebagai penghubung konektivitas jalan kabupaten.



Gambar 2. 3 Kolaborasi Dinas PUTR dengan masyarakat

B. Pengembang dan Investor

Selain masyarakat umum, pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait dengan penyediaan infrastruktur dapat menarik para pengembang, pelaku usaha lokal, dan investor melalui pemberian insentif bagi pelaku usaha, serta kemudahan dalam perizinan usaha.

2.1.5 Dukungan Stakeholder Terkait Perangkat Daerah

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik secara horizontal maupun vertikal (pelayanan kepada Kecamatan maupun Desa/Kelurahan). Perangkat Daerah yang berkesinambungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pemberian pelayanan adalah:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dalam mengatasi banjir Kali Lamong dan meningkatkan konektivitas jalan di Kabupaten Gresik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gresik memiliki peran kunci. Masalah banjir disebabkan oleh penyempitan alur sungai dan kerusakan daerah resapan air, sementara konektivitas jalan yang buruk membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kedua instansi ini bekerja sama untuk merencanakan, merancang, dan melaksanakan

pembebasan lahan yang diperlukan. Kolaborasi dimulai dari perencanaan, di mana Dinas PUTR memberikan data lokasi kepada ATR/BPN untuk dilakukan verifikasi. Setelah itu, ATR/BPN melaksanakan pengukuran tanah dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi. Setelah proses ini selesai, pembebasan lahan dapat dilakukan dan proyek pembangunan dilaksanakan.

2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai hubungan yang erat kaitannya terutama dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyedia infrastruktur hijau seperti ruang terbuka hijau, penanaman pohon pada ruas jalan yang dibangun oleh Dinas PUTR. Selain itu, DLH juga mempunyai peran untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek – proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR. Sebaliknya, Dinas PUTR juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh DLH untuk mencapai program kerja Pemerintah Kabupaten Gresik melalui kemudahan konektivitas Tempat Pengelolaan Sampah atau Pusat Konservasi.

3. Dinas Perhubungan

Keterkaitan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik dengan Dinas Perhubungan sangat erat, terutama dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur, mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dinas PUTR berperan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Sementara itu, Dinas Perhubungan sebagai penyedia utilitas pendukung pembangunan jalan seperti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas-ruas jalan tertentu yang telah dibangun oleh Dinas PUTR. Dinas Perhubungan memiliki peran dalam manajemen transportasi dengan peran tugas dalam pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas serta angkutan. Apabila keduanya berjalan dengan baik maka dapat tercipta mobilisasi masyarakat dan sistem transportasi yang aman, nyaman, lancar, dan terintegrasi. Dengan demikian, kualitas jalan dan jaringan infrastruktur yang dibangun oleh Dinas PUTR akan berfungsi optimal apabila diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas dan transportasi yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan. Sinergi antara kedua dinas ini menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

4. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai keterkaitan kinerja dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah secara terpadu. Dinas PUTR merencanakan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Gresik sedangkan Dinas CKPKP Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penataan kawasan permukiman yang berfokus pada penyediaan dan peningkatan fasilitas umum skala lingkungan. Dinas PUTR berkewenangan untuk membangun dan mengelola saluran dan Jalan - Jalan Kabupaten dan Desa sedangkan Dinas CKPKP mengelola saluran dan jalan – jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Kedua Dinas tersebut berkoordinasi dan berkolaborasi agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas masing – masing.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Gresik adalah Banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peranan penting dalam upaya pengendalian Banjir. Berbagai upaya pencegahan, pengendalian hingga mitigasi bencana nampaknya terus dilakukan sebagai langkah antisipasi bencana banjir tahunan yang melanda wilayah Gresik. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pencegahan banjir dengan normalisasi pelebaran tanggul, mengeruk area sungai yang dangkal, pembangunan kolam retensi, hingga penguatan bronjong atau penahan tanggul serta membangun retarding basin untuk dapat menampung air luapan Kali Lamong. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya penanganan banjir dengan menyalurkan bantuan logistik dan penanganan darurat (menyediakan kapal karet) untuk mengevakuasi warga terdampak.

6. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Pelayanan Publik mengenai Pelayanan Pemberian Perizinan yang diterbitkan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas

Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan melalui OSS tersebut ditujukan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Sedangkan, Website GO-PUTAR yang merupakan Website Pengelolaan Pengendalian Utilitas dan Tata Ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pengurusan pelayanan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang (SKIR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR Non Berusaha, dan pengurusan Peil Banjir. Kedua layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Berusaha, Non Berusaha, Developer serta Perusahaan.

7. Kecamatan

Kecamatan berperan penting untuk membantu Dinas PUTR dalam pengawasan, memonitoring dan evaluasi serta supporting informasi dalam menyelenggaraan pekerjaan.

8. Desa/Kelurahan

Dinas PUTR akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat (Desa/Kelurahan) terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan di tahun yang sedang berjalan maupun tahun yang akan datang. Selain itu, konsolidasi pertanahan yang merupakan kebijakan penataan kembali kepemilikan penggunaan tanah juga melibatkan peran serta masyarakat.

B. Kerja sama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Kerjasama terkait dengan penanggulangan bencana banjir

Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo kembali memperkuat kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan Sumber Daya Air utamanya merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kerja sama tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergi perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung penyediaan air baku serta pengembangan jaringan irigasi hortikultura di Kabupaten Gresik. Kesepakatan ini merupakan langkah lanjutan dari kerja sama yang telah terjalin antara

Pemerintah Kabupaten Gresik dan BBWS Bengawan Solo dalam penanganan normalisasi Kali Lamong guna mengurangi risiko banjir. Program normalisasi tersebut terbukti efektif, dengan semakin berkurangnya frekuensi dan durasi banjir akibat luapan Kali Lamong yang beberapa tahun sebelumnya sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah terdampak.

2. Kerjasama terkait dengan pelebaran Jalan

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berada di wilayah Kabupaten Gresik, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung dan mewujudkan cita-cita Gresik menjadi pusat perekonomian nasional dengan adanya pelebaran jalan ini. Pelebaran jalan tersebut berfokus pada pengembangan JIPE, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, Dinas PUTR Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali (BBPJJN Jatim Bali) dalam proyek pelebaran Jalan Daendels Manyar. Kerjasama ini meliputi koordinasi, survey lokasi, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk proyek yang akan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan mengurangi kemacetan.



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah dapat menjadi permasalahan maupun menjadi peluang pada suatu daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun berasal dari isu global, nasional dan regional. Isu-isu strategis tersebut merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menjadi upaya dalam mencapai prioritas pembangunan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor - faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2. 4 Permasalahan Pembangunan Prioritas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

NO.	PERMASALAHAN PRIORITAS	ANALISA
1.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik didominasi oleh banjir yang memiliki tingkat risiko tinggi sebesar 74%. Potensi bahaya banjir di Kabupaten Gresik sangat besar sehingga dampak kepada masyarakat pun sangat besar. Banjir tersebut merupakan akibat dari luapan Kali Lamong yang sampai saat ini masih terus diupayakan. Namun, selama musim kemarau, daerah sekitar Kali Lamong mengalami kekeringan dengan debit sungai yang sangat rendah.
	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Kemantapan kondisi jalan Kabupaten Gresik masih 70,74% dengan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan yang rendah dengan kategori jalan mulai padat. Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum tersedia secara merata. Keterbatas konektivitas dapat menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai Hinterland Surabaya Metropolitan Area. Keterbatasan konektivitas juga dapat mempengaruhi

NO.	PERMASALAHAN PRIORITAS	ANALISA
		akses industri terhadap tenaga kerja yang berkualitas, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industry serta daya tarik pihak terkait dalam berinvestasi. Rendahnya komitmen pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur mengingat pembiayaan infreastuktur juga disalurkan melalui bantuan keuangan terutama pembangunan infrastruktur perdesaan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

2.2.2 Isu Strategi

Perumusan isu strategis dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Gresik yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan memperhatikan isu strategis global, nasional, regional Jawa Timur, dan lokal. Isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 - 2029 berfungsi sebagai dasar utama untuk perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Isu strategis membantu dalam mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh daerah, menetapkan prioritas pembangunan dengan menilai dampak, urgensi, dan potensi solusi dari berbagai isu yang ada, menjadi dasar dalam pengembangan strategi dan rencana aksi yang terencana dan terarah serta membantu pemerintah daerah dalam memetakan sumber daya yang tersedia dan kapabilitas yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Daerah. Keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar yang merata. Alokasi anggaran yang terbatas tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan drainase. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan infrastruktur dan keterlambatan realisasi proyek strategis daerah. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan efisiensi anggaran serta mencari sumber pendanaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemanfaatan CSR dari dunia usaha.

Tabel 2.5 Keselarasan Isu Strategis Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas PUTR	Permasalahan Dinas PUTR	Isu KLHS Yang Relevan dengan Dinas PUTR	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Dinas PUTR			Isu Strategis Dinas PUTR
			Global	Nasional	Jawa Timur	
Potensi mangrove, pesisir, serta dukungan CSR industri bisa dioptimalkan untuk memperkuat adaptasi iklim dan mitigasi bencana.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Degradasi Lahan dan Konversi Ruang	Perubahan iklim dan lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi agar dapat diterapkan kepada wilayah terdampak bencana banjir dan tersedianya sarana dan prasarana siaga untuk penanggulangan banjir
Letak strategis Gresik, pelabuhan internasional, dan peluang KPBU mendukung percepatan pembangunan konektivitas.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Keterbatasan Infrastruktur Permukiman	Aglomerasi	Meningkatkan Konektivitas		• Keselarasan Pembangunan Wilayah didukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah • Kebutuhan akan Akses infrastruktur dan konektivitas daerah merujuk Sudut Kepentingan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Gresik sebagai KSN Grebangkertasusila yang meliputi Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan Menganti, dan Kawasan Perkotaan Sidayu. Tujuan dari pengembangan KSK ini antara lain untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis nasional melalui pengembangan Kawasan pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan penyediaan infrastruktur Kawasan Perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar yang merata. Alokasi anggaran yang terbatas tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi dan penanganan banjir. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan infrastruktur dan keterlambatan realisasi proyek strategis daerah. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan efisiensi anggaran serta mencari sumber pendanaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemanfaatan CSR dari dunia usaha.





BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai peran strategis di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Kabupaten Gresik terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan Kabupaten Gresik untuk periode 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut **“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan pernyataan aspiratif dengan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan arah pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2030 yaitu **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.** Perumusan Tujuan ini disesuaikan dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 agar selaras dengan pembangunan regional daerah.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan Tata Ruang merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Dinas PUTR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga harus sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yaitu Misi ke – 3 (Tiga) : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kompilasi Sasaran RPJMD yang menjadi Tujuan Renstra menjabarkan 1 (satu) misi kedalam 8 (delapan) Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang akan dicapai selama periode 2025 – 2030.

Tabel 3. 1 Tabel Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	91,42	135.90 - 132.58	132.58- 129.42	129.42- 126.42	126.42- 123.55	123.55- 120.79	120.79- 117.17
2.	Rasio Government Expenditure	%	1,91	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,2
3.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,73	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25
4.	Indeks Infrastruktur	Angka	61,62	63,32	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Memperkuat kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi		indeks risiko bencana (Indeks)	√			91,42	135.90-132.58	132.58-129.42	129.42-126.42	126.42-123.55	123.55-120.79	120.79-117.17
			Rasio Government Expenditure (%)	√			1,91	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,2
			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	√			3,73	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25
			Indeks Infrastruktur (Angka)	√			61,62	63,32	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66
		Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)		√		72,88	73	74	75	76	77	78
		Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)		√		49,85	50,47	51,09	51,71	52,33	52,95	53,58
			Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten (%)		√		65,86	66,37	66,88	67,39	67,9	68,42	68,94
			Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)		√		3,12	9,82	22,77	26,34	36,16	42,86	49,56
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)		√		70,74	70,94	70,29	70,54	70,79	71,04	71,29
			Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)		√		69,86	69,48	69,58	69,68	69,78	69,88	69,98

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)		√		1,34	3,33	5,32	7,31	9,3	11,29	13,27
			Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)		√		50	60	60	60	60	60	60

3.2 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029

Strategi disusun dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran *pembangunan* yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berikut merupakan Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai:

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan peningkatan aksesibilitas kawasan produktif.	Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.	Pengintegrasian sistem manajemen risiko dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.	Penguatan teknologi dan inovasi dalam desain serta konstruksi infrastruktur tahan bencana dan ramah lingkungan.	Penguatan ketangguhan infrastruktur secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Perumusan Strategi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melandasi Petahapan Pertama 2025-2029 dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2045. Pentahapan pertama untuk pembangunan Kabupaten Gresik difokuskan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Perumusan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029 disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Perumusan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	MISI	TUJUAN	No	RPJMD 2025-2029		STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
				SASARAN	STRATEGI	
1	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	1	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.	Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan peningkatan aksesibilitas kawasan produktif.
			2	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan green infrastructure, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.	Penguatan ketangguhan infrastruktur secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.
			3	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.	Penguatan teknologi dan inovasi dalam desain serta konstruksi infrastruktur tahan bencana dan ramah lingkungan. Pengintegrasian sistem manajemen risiko dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.

3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029

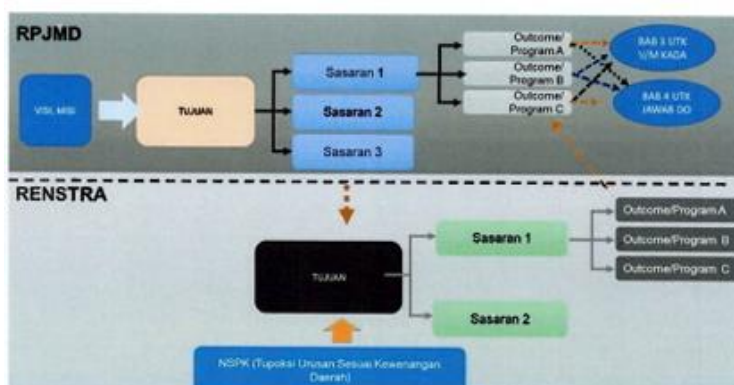
Arah Kebijakan Visi Misi Bupati Gresik Periode 2025 - 2029 disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029 yaitu dirumuskan sebagai berikut:

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan pernyataan aspiratif dengan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan arah pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Setiap penggalan kata dalam visi tersebut mengandung makna mendalam yang mencerminkan komitmen dan integritas yang kuat dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama pemerintahan daerah dan masyarakat Gresik untuk mewujudkan pembangunan yang seutuhnya.



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	Menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan meliputi kegiatan penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengaturan kesesuaian tata ruang, pembebasan dan pengadaan lahan sehingga diharapkan tercipta infrastruktur daerah yang tangguh, merata, inklusif, dan mendukung pertumbuhan wilayah serta kualitas pelayanan publik.	Transformasi Sosial	• Menjamin akses infrastruktur dasar secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan pemerataan ayanan publik. • Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang layak dan modern sebagai prasyarat peningkatan kualitas hidup dan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah. • Melindungi masyarakat dari dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur tangguh dan responsif yang mendukung keselamatan dan keberlangsungan akses terhadap layanan dasar.	Mendukung tersedianya infrastruktur dasar yang merata, layak, modern, dan tangguh, dengan fokus Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar, keterjangkauan dan Kelayakan Infrastruktur Modern yang layak, terjangkau, dan modern serta membangun dan memperkuat infrastruktur yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim
		Transformasi Ekonomi	• Mendorong percepatan infrastruktur strategis sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi logistik, dan perluasan peluang investasi di sektor produktif. • Pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas industri, perdagangan, dan investasi melalui integrasi kawasan dan sistem logistik yang efisien, cerdas, dan berbasis teknologi.	Memfokuskan kebijakan pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan yang mengarah pada kelancaran logistik, peningkatan konektivitas kawasan industri dan perdagangan, serta perluasan investasi melalui sistem infrastruktur yang efisien dan berbasis teknologi serta memastikan perlindungan infrastruktur ekonomi strategis dari risiko bencana dan dampak perubahan iklim melalui

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			Menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi melalui perlindungan infrastruktur ekonomi strategis dari risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta mendorong efisiensi biaya melalui penerapan green economy.	penerapan prinsip green economy dengan berwawasan lingkungan. bertujuan untuk menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi serta menciptakan efisiensi biaya pembangunan dalam jangka panjang
	Transformasi Tata Kelola	- Penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur melalui sistem perencanaan terpadu, pengawasan berbasis digital, dan peningkatan akuntabilitas lintas sektor dan wilayah. - Peningkatan tata kelola infrastruktur melalui sistem manajemen berbasis data spasial dan digital, pelibatan pemangku kepentingan, serta transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan. - Integrasi sistem manajemen risiko bencana dalam siklus perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi prediktif serta sistem informasi geografis (GIS).	Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur melalui sistem perencanaan terpadu berbasis data spasial dan digital. Upaya ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek serta melakukan integrasi sistem manajemen risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi prediktif dan sistem informasi geografis (GIS), serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung infrastruktur yang aman, adaptif, dan berkelanjutan	
	Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip tata ruang dan hukum, serta menjamin stabilitas sosial dan keamanan proyek pembangunan melalui pendekatan partisipatif.	Menyediakan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang, peraturan perundang-undangan, dan prinsip keberlanjutan. Pembangunan dilaksanakan secara tertib dan legal, dengan pendekatan partisipatif guna	

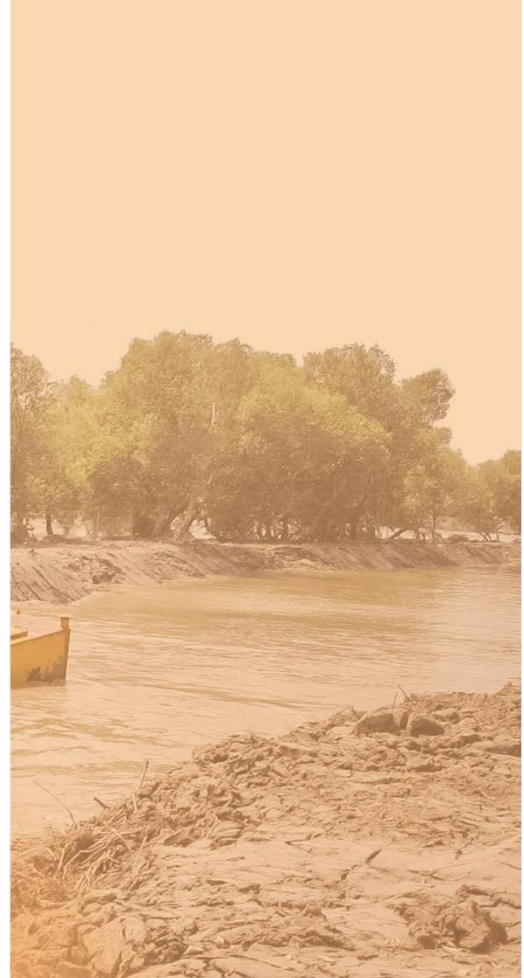
No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			• Penegakan aturan tata ruang dan kepastian hukum dalam pengembangan infrastruktur strategis untuk menciptakan iklim pembangunan yang tertib, stabil, dan mendukung investasi • Penegakan regulasi lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko serta peningkatan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur.	menjaga stabilitas sosial serta mendorong iklim investasi yang aman serta memperkuat penegakan regulasi tata ruang dan lingkungan, dengan pendekatan berbasis mitigasi risiko dan peningkatan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan, guna memastikan infrastruktur yang terencana, legal, dan berkelanjutan
		Landasan Transformasi - Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	• Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi risiko bencana serta mempertimbangkan nilai nilai sosial dan kearifan lokal dalam perencanaannya. • Pengarusutamaan prinsip ekologi dan pembangunan rendah karbon dalam infrastruktur, serta pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan risiko dan konservasi lingkungan.	Mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan, adaptif terhadap bencana, dan selaras dengan nilai-nilai sosial serta kearifan lokal. Perencanaan dan pelaksanaannya mengutamakan prinsip ekologi, pembangunan rendah karbon, serta konservasi lingkungan secara partisipatif dan mendorong pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan risiko dan perlindungan kawasan strategis, guna memastikan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan iklim
		Kerangka Implementasi Transformasi- Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	• Penyediaan infrastruktur di wilayah hinterland, pedesaan, dan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat keterpaduan wilayah. • Pemerataan pembangunan infrastruktur	Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah hinterland, pedesaan, dan kawasan tertinggal guna mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat keterpaduan wilayah. Pembangunan difokuskan pada penyediaan infrastruktur strategis yang adaptif terhadap bencana dan



No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			strategis hingga wilayah pinggiran, hinterland, dan pedesaan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan daya saing kawasan secara inklusif. • Pemerataan infrastruktur adaptif di wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan iklim, dengan memastikan tidak ada wilayah tertinggal dalam perlindungan risiko dan kelayakan infrastruktur.	perubahan iklim, dengan memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam akses terhadap infrastruktur dasar dan perlindungan risiko, demi terwujudnya pengembangan kawasan yang inklusif dan berdaya saing.
		Kerangka Implementasi Transformasi- Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	• Membangun dan merevitalisasi infrastruktur dengan kualitas tinggi dan berkelanjutan, termasuk melalui inovasi teknologi hijau dan material ramah lingkungan, serta memperluas cakupan infrastruktur digital dan konektivitas jalan, energi, air, dan sanitasi. • Penerapan standar <i>green infrastructure</i>, pemanfaatan material ramah lingkungan, sistem drainase berwawasan lingkungan, serta desain tahan gempa dan banjir dalam pembangunan infrastruktur	Membangun dan merevitalisasi infrastruktur yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan adaptif melalui pemanfaatan teknologi hijau dan material ramah lingkungan. Fokus pembangunan meliputi penguatan infrastruktur digital. Penerapan standar <i>green infrastructure</i>, dan desain konstruksi tahan gempa dan banjir menjadi bagian dari strategi utama untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh, efisien, dan mendukung kualitas hidup masyarakat
		Kerangka Implementasi Transformasi- Kesiambungan Pembangunan	• Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proyek infrastruktur jangka panjang melalui kolaborasi multipihak, skema pembiayaan kreatif (PPP, CSR, blended finance), dan pemeliharaan aset infrastruktur secara berkala untuk menjaga keberlanjutannya.	Membangun dan merevitalisasi infrastruktur dengan standar kualitas tinggi yang berkelanjutan, melalui penerapan teknologi hijau, material ramah lingkungan, serta desain yang tahan bencana. Pembangunan difokuskan pada perluasan konektivitas

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			• Pengembangan infrastruktur dengan pendekatan jangka panjang, skema pembiayaan inovatif, dan perawatan aset infrastruktur secara berkelanjutan untuk menjaga daya guna dan keberlangsungan manfaatnya bagi generasi mendatang. • Mendorong investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur tangguh, memperkuat sistem pemeliharaan berkelanjutan, dan membangun ekosistem pembiayaan untuk proyek infrastruktur yang memperhatikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	jalan, air, energi, sanitasi, serta penguatan infrastruktur digital. Prinsip <i>green infrastructure</i>, sistem drainase lingkungan, dan konstruksi adaptif terhadap gempa dan banjir menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pembangunan.





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan program perangkat Daerah diselaraskan dengan kewajiban pembiayaan (*mandatory spending*), program prioritas nawakarsa, belanja operasional rutin, inovasi, dan pertimbangan lainnya yang dapat mendukung program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Perumusan program pembangunan prioritas berdasarkan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang disebut dengan **Nawakarsa**. Nawakarsa berasal dari dua kata, yakni "Nawa" yang berarti sembilan, dan "Karsa" yang bermakna kehendak, niat, atau cita-cita luhur. Secara harfiah, Nawakarsa dapat dimaknai sebagai sembilan kehendak mulia yang menjadi landasan utama arah pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode 2025–2029. Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi bentuk perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 2029. Nakawarsa dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) navigasi meliputi :

- 1). Gresik Tuntas,
- 2). Gresik Seger,
- 3). Gresik Mapan,
- 4). Gresik Agropolitan,
- 5). Gema Karya,
- 6). Gresik Cemerlang,
- 7). Gresik Sehati,
- 8). Gresik Barokah, dan

9). Pesona Gresik.

Program Prioritas Nawakarsa yang diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Adalah Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman) merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Proyek seperti Gresik Bebas Banjir, dan Jalan Lintas Utara-Selatan, menjadi fondasi terciptanya ruang-ruang publik yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan ekonomi rakyat.

Navigasi	Sub Navigasi	
Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisasi program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan
	Pembangunan Jalan Lintas Utara - Selatan	Program membangun jalan alternatif dari gresik bagian utara hingga ke bagian selatan
	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan

Nomenklatur program - program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Program tersebut terdiri dari program - program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan maupun yang bersifat pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat. Adapun perumusan program pembangunan prioritas berdasarkan Nawakarsa yang dalam pelaksanaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pedoman dalam merumuskan program, kegiatan dan subkegiatannya mencakup :

Tabel 4. 1 Tabel Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUTR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
1.03.2.10.0.00.00.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							
- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Memperkuat kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Tercapainya sasaran strategis OPD		indeks risiko bencana (Indeks)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
					Indeks Infrastruktur (Angka)		
					Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)		Sekretariat
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun (dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sekretariat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
				Tersusunnya dokumen klasifikasi aset	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun (dokumen)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretariat
				Tersedianya kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR (Jenis)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretariat
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat
				Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR (Jenis)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan	Sekretariat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
					Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	Sekretariat
				Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR (Jenis)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat
				Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sekretariat
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
		Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat			Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)		Sumber Daya Air
					Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten (%)		Sumber Daya Air
					Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)		Sumber Daya Air
			Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir		Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sumber Daya Air
					Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sumber Daya Air
					Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sumber Daya Air
					Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong (Angka)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sumber Daya Air
					Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sumber Daya Air
				Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Air
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Sumber Daya Air
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Air
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sumber Daya Air

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	Sumber Daya Air
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Sumber Daya Air
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	Sumber Daya Air
					Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Sumber Daya Air
				Terlaksanannya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi (meter)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Air
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Daya Air
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Sumber Daya Air
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Sumber Daya Air
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan			Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)		Bina Marga
					Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)		Bina Marga
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bina Marga
					Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bina Marga
					Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Bina Marga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
				Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (Km)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bina Marga
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	Bina Marga
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Bina Marga
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Bina Marga
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	Bina Marga
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	Bina Marga
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Bina Marga
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	Bina Marga
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	Bina Marga
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	Bina Marga
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bina Marga
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	Bina Marga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah			Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)		Tata Ruang
					Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)		Pertanahan
			Meningkatnya penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan		Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Pertanahan
				Terealisasi sengketa tanah garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi (Sengketa)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertanahan
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertanahan
			Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pertanahan
				Terealisasinya pembebasan lahan	Luas lahan yang dibebaskan (m2)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pertanahan
					Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertanahan
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pertanahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
			Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tata Ruang
					Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tata Ruang
				Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Dalam Proses Legalisasi (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tata Ruang
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tata Ruang
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Tata Ruang
				Tersedianya Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tata Ruang
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tata Ruang
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Tata Ruang
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tata Ruang
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tata Ruang
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
				Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tata Ruang
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tata Ruang
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Tata Ruang
1.03.0.00.0.00.00.0002 - UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan							
- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Memperkuat kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir di Wilayah Selatan	Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang Wilayah Selatan	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman di Wilayah Selatan	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan Wilayah Selatan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
1.03.0.00.0.00.00.0003 - UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara							
- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir di Wilayah Utara		Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik di Wilayah Utara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman di Wilayah Utara		Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan di Wilayah Utara	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
1.03.0.00.0.00.00.0004 - UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean							
- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung	Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir		Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	BIDANG
strategis Daerah - Memperkuat kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	pertumbuhan ekonomi	ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	di Wilayah Bawean	Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang Wilayah Bawean	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman di Wilayah Bawean		Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan di Wilayah Bawean	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan suatu aspek operasional yang nyata dari Renstra yang berturut - turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Kaitannya dengan Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun *output* selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUTR Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				278.018.713.735		276.343.752.000		283.111.687.000		267.986.723.000		272.345.962.000		310.835.848.000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.583.660.171		21.694.282.000		22.337.683.000		23.157.954.000		24.318.100.000		25.060.501.000	SEKRETARIAT
Tercapainya sasaran strategis OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	53,45	60	21.583.660.171	60	21.694.282.000	60	22.337.683.000	60	23.157.954.000	60	24.318.100.000	60	25.060.501.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				501.186.678		501.187.153		501.186.678		501.186.690		501.186.876		501.186.747	SEKRETARIAT
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun (Dokumen)	30	30	501.186.678	43	501.187.153	43	501.186.678	43	501.186.690	43	501.186.876	43	501.186.747	SEKRETARIAT
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	SEKRETARIAT
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	5	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				151.186.678		151.187.153		151.186.678		151.186.690		151.186.876		151.186.747	SEKRETARIAT
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	14	13	151.186.678	10	151.187.153	10	151.186.678	10	151.186.690	10	151.186.876	10	151.186.747	SEKRETARIAT
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.086.323.893		12.125.000.000		14.200.000.000		14.200.000.000		14.434.862.368		15.159.452.105	SEKRETARIAT
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1	1	15.086.323.893	1	12.125.000.000	1	14.200.000.000	1	14.200.000.000	1	14.434.862.368	1	15.159.452.105	SEKRETARIAT
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.986.324.093		11.900.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		14.234.862.368		14.959.452.105	SEKRETARIAT
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	106	103	14.986.324.093	118	11.900.000.000	118	14.000.000.000	118	14.000.000.000	118	14.234.862.368	118	14.959.452.105	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				99.999.800		225.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8	8	99.999.800	8	225.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						23.541.000		25.895.100		28.484.610		31.333.071		34.466.378	SEKRETARIAT
Tersusunnya dokumen klasifikasi aset	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun (dokumen)	6	6	76.378.300	6	23.541.000	6	25.895.100	6	28.484.610	6	31.333.071	6	34.466.378	SEKRETARIAT
1.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				76.378.300		23.541.000		25.895.100		28.484.610		31.333.071		34.466.378	SEKRETARIAT
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	76.378.300	1	23.541.000	6	25.895.100	6	28.484.610	6	31.333.071	6	34.466.378	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.307.692.600		1.167.715.878		1.230.317.846		1.308.349.866		1.339.184.851		1.423.102.934	SEKRETARIAT
Tersedianya kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR (Jenis)	36	36	1.307.692.600	36	1.167.715.878	36	1.230.317.846	36	1.308.349.866	36	1.339.184.851	36	1.423.102.934	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				20.038.600		30.049.900		33.054.890		36.360.379		39.996.417		43.996.059	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.038.600	1	30.049.900	1	33.054.890	1	36.360.379	1	39.996.417	1	43.996.059	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				784.798.800		208.278.778		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	784.798.800	2	208.278.778	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.425.000		51.548.800		56.703.680		62.374.048		68.611.452		75.472.598	SEKRETARIAT
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	34.425.000	2	51.548.800	2	56.703.680	2	62.374.048	2	68.611.452	2	75.472.598	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.347.400		60.520.800		66.572.666		73.230.168		80.553.184		88.608.100	SEKRETARIAT
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.347.400	1	60.520.800	1	66.572.666	1	73.230.168	1	80.553.184	1	88.608.100	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				25.024.000		37.378.000		41.115.800		45.227.380		49.750.118		54.725.129	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
undangan															
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	25.024.000	2	37.378.000	1	41.115.800	1	45.227.380	1	49.750.118	1	54.725.129	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				49.981.700		75.337.100		82.870.810		91.157.891		100.273.680		110.301.048	SEKRETARIAT
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	49.981.700	2	75.337.100	2	82.870.810	2	91.157.891	2	100.273.680	2	110.301.048	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				353.077.100		254.602.500		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	SEKRETARIAT
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	353.077.100	4	254.602.500	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		450.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000	SEKRETARIAT
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	-	3	450.000.000	3	500.000.000	4	550.000.000	5	550.000.000	6	600.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang				-		3.332.207.169		1.652.693.376		1.136.342.834		1.636.342.834		1.136.342.836	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR (jenis)	9	0	-	3	3.332.207.169	3	1.652.693.376	3	1.136.342.834	6	1.636.342.834	6	1.136.342.836	SEKRETARIAT
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		893.237.000		500.000.000		136.342.834		136.342.834		136.342.836	SEKRETARIAT
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	2	893.237.000	1	500.000.000	1	136.342.834	1	136.342.834	1	136.342.836	SEKRETARIAT
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				-		2.438.970.169		1.152.693.376		1.000.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	2.438.970.169	1	1.152.693.376	2	1.000.000.000	2	1.500.000.000	2	1.000.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.414.202.700		2.366.350.100		2.292.590.000		2.915.090.000		3.049.840.000		3.198.065.000	SEKRETARIAT
Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR (Jenis)	20	20	2.414.202.700	20	2.366.350.100	20	2.292.590.000	20	2.915.090.000	20	3.049.840.000	20	3.198.065.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		549.995.300		825.000.000		907.500.000		998.250.000		1.098.075.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4	4	500.000.000	4	549.995.300	4	825.000.000	4	907.500.000	4	998.250.000	4	1.098.075.000	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	dan Listrik yang Disediakan (Laporan)														
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.086.800		248.764.800		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	7	26.086.800	7	248.764.800	7	400.000.000	7	440.000.000	7	484.000.000	7	532.400.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.888.115.900		1.567.590.000		1.067.590.000		1.567.590.000		1.567.590.000		1.567.590.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	9	1.888.115.900	9	1.567.590.000	9	1.067.590.000	9	1.567.590.000	9	1.567.590.000	9	1.567.590.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.197.876.000		2.178.280.700		2.435.000.000		3.068.500.000		3.325.350.000		3.607.885.000	SEKRETARIAT
Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara (Unit)	340	340	2.197.876.000	340	2.178.280.700	340	2.435.000.000	340	3.068.500.000	340	3.325.350.000	340	3.607.885.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan.				345.498.000		318.242.000		685.000.000		753.500.000		828.850.000		911.735.000	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	56	50	345.498.000	50	318.242.000	22	685.000.000	22	753.500.000	22	828.850.000	22	911.735.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				898.457.000		575.178.700		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	SEKRETARIAT
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	30	25	898.457.000	25	575.178.700	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.941.000		314.901.200		350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000	SEKRETARIAT
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	205	200	199.941.000	200	314.901.200	220	350.000.000	220	385.000.000	220	423.500.000	220	465.850.000	SEKRETARIAT
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				753.980.000		969.958.800		900.000.000		1.430.000.000		1.573.000.000		1.730.300.000	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	3	753.980.000	3	969.958.800	3	900.000.000	3	1.430.000.000	3	1.573.000.000	3	1.730.300.000	SEKRETARIAT
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				29.005.953.844		29.014.718.000		29.875.227.000		30.972.286.000		32.523.908.000		33.516.822.000	SUMBER DAYA AIR
Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air (%)	89	80	28.866.768.922	80	28.049.718.000	80	28.910.227.000	80	29.822.286.000	80	31.373.908.000	80	32.366.822.000	SUMBER DAYA AIR
	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	6,41	5,77		5,77		5,77		5,77		5,77		SUMBER DAYA AIR		
	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	7,43	8,77		8,77		8,77		9,11		9,11		SUMBER DAYA AIR		
	Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun (%)	14,29	14,29		14,29		14,29		14,29		14,29		SUMBER DAYA AIR		
	Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong (Angka)	2	2		2		2		2		2		SUMBER DAYA AIR		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.828.437.398		18.753.900.914		19.338.717.704		19.383.235.590		20.953.806.860		21.946.720.860	SUMBER DAYA AIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	71	73,31	15.828.437.398	75,31	18.753.900.914	77,31	19.338.717.704	79,32	19.383.235.590	81,32	20.953.806.860	81,32	21.946.720.860	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				1.742.810.000		2.190.435.627		2.255.398.828		2.338.220.208		2.455.358.207		2.455.358.207	SUMBER DAYA AIR
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	7	7	1.742.810.000	7	2.190.435.627	7	2.255.398.828	7	2.338.220.208	7	2.455.358.207	7	2.455.358.207	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				141.539.700		177.892.944		183.168.833		189.895.047		199.408.234		199.408.234	SUMBER DAYA AIR
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	8	8	141.539.700	8	177.892.944	8	183.168.833	8	189.895.047	9	199.408.234	9	199.408.234	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				817.257.900		1.027.163.571		1.057.627.116		1.096.463.795		1.151.394.415		1.151.393.717	SUMBER DAYA AIR
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	2	817.257.900	2	1.027.163.571	2	1.057.627.116	2	1.096.463.795	2	1.151.394.415	2	1.151.393.717	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				8.695.386.956		10.000.000.000		10.687.841.991		10.000.000.000		11.100.497.600		12.093.412.299	SUMBER DAYA AIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (KM)	75	50	8.695.386.956	50	10.000.000.000	50	10.687.841.991	50	10.000.000.000	53	11.100.497.600	53	12.093.412.299	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				1.199.913.500		1.508.100.871		1.552.827.618		1.609.849.607		1.690.498.367		1.690.498.367	SUMBER DAYA AIR
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	15	7	1.199.913.500	7	1.508.100.871	7	1.552.827.618	7	1.609.849.607	7	1.690.498.367	7	1.690.498.367	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				2.314.517.400		2.908.981.112		2.595.254.693		3.105.244.608		3.260.808.288		3.260.808.288	SUMBER DAYA AIR
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	7	7	2.314.517.400	7	2.908.981.112	7	2.595.254.693	7	3.105.244.608	7	3.260.808.288	7	3.260.808.288	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku				777.827.020		941.326.789		1.006.598.625		1.043.562.325		1.095.841.748		1.095.841.748	SUMBER DAYA AIR
Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	777.827.020	1	941.326.789	1	1.006.598.625	1	1.043.562.325	1	1.095.841.748	1	1.095.841.748	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada				13.038.331.524		9.295.817.086		9.571.509.296		10.439.050.410		10.420.101.140		10.420.101.140	SUMBER DAYA AIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Terlaksanannya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi (meter)	10.950	12.920	13.038.331.524	12.920	9.295.817.086	12.920	9.571.509.296	12.920	10.439.050.410	13.420	10.420.101.140	13.420	10.420.101.140	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				7.731.743.549		2.626.278.033		2.704.167.302		3.319.530.073		2.943.913.642		2.943.913.642	SUMBER DAYA AIR
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1,75	0,92	7.731.743.549	0,92	2.626.278.033	0,92	2.704.167.302	0,92	3.319.530.073	0,92	2.943.913.642	0,92	2.943.913.642	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.867.768.875		4.861.171.751		5.005.342.744		5.189.145.887		5.449.106.930		5.449.106.930	SUMBER DAYA AIR
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	7,2	12	3.867.768.875	12	4.861.171.751	12	5.005.342.744	12	5.189.145.887	12,5	5.449.106.930	12,5	5.449.106.930	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				1.438.819.100		1.808.367.302		1.861.999.249		1.930.374.450		2.027.080.568		2.027.080.568	SUMBER DAYA AIR
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	3	11	1.438.819.100	11	1.808.367.302	11	1.861.999.249	11	1.930.374.450	11	2.027.080.568	11	2.027.080.568	SUMBER DAYA AIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir di Wilayah Bawean	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	6,41	5,77	40.122.500	5,77	75.000.000	5,77	75.000.000	5,77	150.000.000	5,77	150.000.000	5,77	150.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	7,43	8,77		8,77		8,77		9,11		9,11		UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.122.500		75.000.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang Wilayah Bawean	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	71	73,31	40.122.500	75,31	75.000.000	77,31	75.000.000	79,32	150.000.000	81,32	150.000.000	81,32	150.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				40.122.500		75.000.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	17	17	40.122.500	17	75.000.000	17	75.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	6,41	5,77	50.000.000	5,77	500.000.000	5,77	500.000.000	5,77	500.000.000	5,77	500.000.000	5,77	500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
dampak bencana banjir di Wilayah Selatan	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	7,43	8,77		8,77		8,77		8,77		9,11		9,11		UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang Wilayah Selatan	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	71	73,31	50.000.000	75,31	500.000.000	77,31	500.000.000	79,32	500.000.000	81,32	500.000.000	81,32	500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				50.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	64	64	50.000.000	64	500.000.000	64	500.000.000	64	500.000.000	64	500.000.000	64	500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir di Wilayah Utara	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	7,43	8,77	49.062.422	8,77	390.000.000	8,77	390.000.000	8,77	500.000.000	9,11	500.000.000	9,11	500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	6,41	5,77		5,77		5,77		5,77		5,77		UPT DPUTR WILAYAH UTARA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				49.062.422		390.000.000		390.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik di Wilayah Utara	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	71	73,31	49.062.422	75,31	390.000.000	77,31	390.000.000	79,32	500.000.000	81,32	500.000.000	81,32	500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				49.062.422		390.000.000		390.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	30	30	49.062.422	30	390.000.000	30	390.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				184.783.725.242		224.221.546.000		229.443.659.000		212.347.931.000		213.919.827.000		250.626.037.000	BINA MARGA
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	10,31	33,68	184.603.634.642	17,6	222.261.546.000	19,23	227.483.659.000	19,84	210.172.931.000	20,68	211.744.827.000	20,97	248.451.037.000	BINA MARGA
	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan (%)	72	75		75		75		75		75		BINA MARGA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	0,021	0,764		0,764		0,767		0,767		0,772		0,774		BINA MARGA
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota				184.603.634.642		222.261.546.000		227.483.659.000		210.172.931.000		211.744.827.000		248.451.037.000	BINA MARGA
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (KM)	17,26	55,83	184.603.634.642	31,27	222.261.546.000	34,07	227.483.659.000	34,84	210.172.931.000	35,98	211.744.827.000	36,16	248.451.037.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				500.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.550.000.000		1.900.000.000		2.300.000.000	BINA MARGA
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	0	3	500.000.000	4	1.000.000.000	5	1.250.000.000	5	1.550.000.000	6	1.900.000.000	6	2.300.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.763.100.380		4.000.000.000		4.300.000.000		4.700.000.000		5.200.000.000		6.000.000.000	BINA MARGA
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	40	34	1.763.100.380	20	4.000.000.000	22	4.300.000.000	23	4.700.000.000	25	5.200.000.000	25	6.000.000.000	BINA MARGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.942.956.480		2.000.000.000		2.275.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000	BINA MARGA
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	21	1.000	1.942.956.480	1.000	2.000.000.000	1.000	2.275.000.000	1.000	2.500.000.000	1.000	3.000.000.000	1.000	3.500.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				30.400.600.118		35.200.000.000		41.430.914.927		43.000.000.000		47.000.000.000		47.000.000.000	BINA MARGA
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	13,05	21,91	30.400.600.118	17,1	35.200.000.000	17,5	41.430.914.927	18	43.000.000.000	18,5	47.000.000.000	19	47.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				70.947.135.324		116.449.771.792		141.007.744.073		115.972.931.000		100.044.827.000		128.451.037.000	BINA MARGA
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1,088	8	70.947.135.324	9,16	116.449.771.792	12,33	141.007.744.073	12,2	115.972.931.000	12,35	100.044.827.000	11,48	128.451.037.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				2.758.477.000		3.000.000.000		3.200.000.000		3.500.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000	BINA MARGA
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0	1,5	2.758.477.000	0,8	3.000.000.000	0,82	3.200.000.000	0,82	3.500.000.000	0,85	4.500.000.000	0,85	5.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				1.581.208.000		3.500.000.000		3.200.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	BINA MARGA
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0	2,32	1.581.208.000	0,81	3.500.000.000	0,82	3.200.000.000	0,82	3.500.000.000	0,83	4.000.000.000	0,83	4.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				2.053.234.750		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000	BINA MARGA
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi (Jembatan) 2025 Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 2026-2030	0	1	2.053.234.750	6	1.200.000.000	7	1.300.000.000	8	1.400.000.000	8	1.500.000.000	9	1.600.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				5.724.166.000		8.000.000.000		10.000.000.000		12.000.000.000		17.000.000.000		20.000.000.000	BINA MARGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1,3	0,5	5.724.166.000	1,4	8.000.000.000	1,6	10.000.000.000	1,8	12.000.000.000	2,1	17.000.000.000	2,5	20.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.692.231.750		1.500.000.000		1.520.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	BINA MARGA
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0	15	1.692.231.750	3	1.500.000.000	3	1.520.000.000	3	1.550.000.000	3	1.600.000.000	3	1.600.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				55.389.736.655		28.411.774.208		10.000.000.000		12.000.000.000		17.000.000.000		20.000.000.000	BINA MARGA
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1,82	21,6	55.389.736.655	2	28.411.774.208	1	10.000.000.000	1,2	12.000.000.000	1,35	17.000.000.000	1,5	20.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				9.670.697.585		18.000.000.000		8.000.000.000		8.500.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000	BINA MARGA
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Jembatan)2025 Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 2026-2030	6	6	9.670.697.585	10	18.000.000.000	10	8.000.000.000	10	8.500.000.000	10	9.000.000.000	10	9.000.000.000	BINA MARGA
Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman di Wilayah Bawean	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	0,021	0,764	80.090.600	0,764	150.000.000	0,767	150.000.000	0,767	175.000.000	0,772	175.000.000	0,774	175.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	10,31	33,68		17,6		19,23		19,84		20,68		20,97		UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota				80.090.600		150.000.000		150.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan di Wilayah Bawean	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (KM)	17,26	55,83	80.090.600	31,27	150.000.000	34,07	150.000.000	34,84	175.000.000	35,98	175.000.000	36,16	175.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				80.090.600		150.000.000		150.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	68	68	80.090.600	68	150.000.000	68	150.000.000	68	175.000.000	68	175.000.000	68	175.000.000	UPT DPUTR WILAYAH BAWEAN
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman di Wilayah Selatan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	10,31	33,68	50.000.000	17,6	1.000.000.000	19,23	1.000.000.000	19,84	1.000.000.000	20,68	1.000.000.000	20,97	1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	0,021	0,764		0,764		0,767		0,767		0,772		0,774		UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota				50.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan Wilayah Selatan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (KM)	17,26	55,83	50.000.000	31,27	1.000.000.000	34,07	1.000.000.000	34,84	1.000.000.000	35,98	1.000.000.000	36,16	1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				50.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	158	158	50.000.000	158	1.000.000.000	158	1.000.000.000	158	1.000.000.000	158	1.000.000.000	158	1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH SELATAN
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	10,31	0,764	50.000.000	17,6	810.000.000	19,23	810.000.000	19,84	1.000.000.000	20,68	1.000.000.000	20,97	1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
di Wilayah Utara	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	0,021	33,68		0,764		0,767		0,767		0,772		0,774		UPT DPUTR WILAYAH UTARA
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota				50.000.000		810.000.000		810.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan di Wilayah Utara	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (KM)	17,26	55,83	50.000.000	31,27	810.000.000	34,07	810.000.000	34,84	1.000.000.000	35,98	1.000.000.000	36,16	1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				50.000.000		810.000.000		810.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	12	12	50.000.000	12	810.000.000	30	810.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	UPT DPUTR WILAYAH UTARA
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG				1.406.000.000		1.413.206.000		1.455.118.000		1.508.552.000		1.584.127.000		1.632.488.000	TATA RUANG
Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha (%)	108,6	100	1.406.000.000	100	1.413.206.000	100	1.455.118.000	100	1.508.552.000	100	1.584.127.000	100	1.632.488.000	TATA RUANG
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang (%)	0,8	1,61		2,41		3,21		4,02		4,82		5,62		TATA RUANG
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah				365.855.720		383.206.000		405.118.000		398.552.000		405.000.000		465.000.000	TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota															
Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Dalam Proses Legalisasi (Dokumen)	6	6	365.855.720	6	383.206.000	7	405.118.000	8	398.552.000	8	405.000.000	8	465.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				178.023.720		132.906.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000	TATA RUANG
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	178.023.720	1	132.906.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				187.832.000		250.300.000		255.118.000		248.552.000		255.000.000		265.000.000	TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	2	187.832.000	2	250.300.000	2	255.118.000	2	248.552.000	2	255.000.000	2	265.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						605.000.000		625.000.000		655.000.000		675.000.000		675.000.000	TATA RUANG
Tersedianya Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang (Dokumen)	7	7	529.662.000	7	605.000.000	7	625.000.000	8	655.000.000	8	675.000.000	8	675.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				479.662.000		580.000.000		600.000.000		630.000.000		650.000.000		650.000.000	TATA RUANG
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	479.662.000	2	580.000.000	2	600.000.000	2	630.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				50.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1	2	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				244.370.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000	TATA RUANG
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah (Dokumen)	1	1	244.370.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				56.330.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000	TATA RUANG
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	56.330.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				188.040.000		0		0		0		0		0	TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	188.040.000		0		0		0		0		0	TATA RUANG
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				266.112.280		350.000.000		350.000.000		380.000.000		424.127.000		412.488.000	TATA RUANG
Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1	1	266.112.280	1	350.000.000	1	350.000.000	1	380.000.000	1	424.127.000	1	412.488.000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				104.164.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		204.127.000		182.488.000	TATA RUANG
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	104.164.500	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	204.127.000	1	182.488.000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				161.947.780		200.000.000		200.000.000		230.000.000		220.000.000		230.000.000	TATA RUANG
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1	1	161.947.780	2	200.000.000	2	200.000.000	2	230.000.000	2	220.000.000	2	230.000.000	TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				41.558.650.000		41.771.648.000		43.010.498.000		44.589.903.000		46.823.727.000		48.255.143.000	PERTANAHAN
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				50.000.000		50.256.000		51.747.000		53.647.000		56.335.000		60.000.000	PERTANAHAN
Meningkatnya penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	8,33	10	50.000.000	10	50.256.000	10	51.747.000	10	53.647.000	10	56.335.000	10	60.000.000	PERTANAHAN
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.256.000		51.747.000		53.647.000		56.335.000		60.000.000	PERTANAHAN
Terselesainya sengketa tanah garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi (Sengketa)	1	10	50.000.000	2	50.256.000	2	51.747.000	2	53.647.000	2	56.335.000	2	60.000.000	PERTANAHAN
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.256.000		51.747.000		53.647.000		56.335.000		60.000.000	PERTANAHAN
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10	50.000.000	2	50.256.000	2	51.747.000	2	53.647.000	2	56.335.000	2	60.000.000	PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK				41.508.650.000		41.721.392.000		42.958.751.000		44.536.256.000		46.767.392.000		48.195.143.000	PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
PEMBANGUNAN															
Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)	1,56	20	41.508.650.000	25	41.721.392.000	30	42.958.751.000	35	44.536.256.000	40	46.767.392.000	45	48.195.143.000	PERTANAHAN
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				41.508.650.000		41.721.392.000		42.958.751.000		44.536.256.000		46.767.392.000		48.195.143.000	PERTANAHAN
Terealisasinya pembebasan lahan	Luas lahan yang dibebaskan (m2)	308	20.000	41.508.650.000	20.000	41.721.392.000	20.000	42.958.751.000	20.000	44.536.256.000	20.000	46.767.392.000	20.000	48.195.143.000	PERTANAHAN
2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.618.650.000		0		0		0		0		0	PERTANAHAN
Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	0	4	1.618.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PERTANAHAN
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah				39.890.000.000		41.721.392.000		42.958.751.000		44.536.256.000		46.767.392.000		48.195.143.000	PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												BIDANG
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4	39.890.000.000	4	41.721.392.000	4	42.958.751.000	4	44.536.256.000	4	46.767.392.000	4	48.195.143.000	PERTANAHAN

Penetapan Indikator dan Target Program sampai dengan subkegiatan memperhatikan arsitektur pohon kinerja. Arsitektur pohon kinerja RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 telah diklasifikasikan menjadi ultimate outcome (tujuan), intermediate outcome sebagai critical succes factor (sasaran), intermediate outcome yang sesuai dengan Sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arsitektur ini menjadi panduan dalam penyusunan kinerja di tingkat immediate outcome (program pembangunan Daerah), dan output serta proses sebagai kinerja operasional pada penjabaran kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah. Pagu Indikatif Program sampai dengan subkegiatan harus memperhatikan estimasi pertumbuhan pendapatan dan Belanja Daerah dengan penetapan secara mendetail pendanaan masing-masing kemudian disinkronisasikan dengan kewajiban pembiayaan (mandatory spending), program prioritas nawakarsa, belanja operasional rutin, inovasi, dan pertimbangan lainnya dalam perumusan kerangka pendanaan indikatif tahun 2025-2029. Berikut merupakan Tabel Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif penetapan Indikator, Target, dan Pagu Indikatif. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra PD tahun 2030-2034.

Tabel 4. 3 Daftar sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2030

N O	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	Gresik Bebas Banjir Tahap ke 2	Optimalisasi program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan	Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan , serta pengurangan dampak bencana banjir	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun (%)	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
								Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	8,77	8,77	8,77	8,77	9,11	9,11
								Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun (%)	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
								Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong (Angka)	2	2	2	2	2	2
								Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air (%)	80	80	80	80	80	80
					1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	73,31	75,31	77,31	79,32	81,32	81,32
						1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	7	7	7	7	7	7
						1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	50	50	50	50	53	53

N O	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	7	7	7	7	7	7
							1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	7	7	7	7	7	7
					2.10.05 - PROGRAM PENYELES AIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN			Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)	20	25	30	35	40	45
							2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan (m2)	308	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
							2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4	4	4	4	4

N O	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari Gresik bagian utara hingga ke bagian selatan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	33,68	17,6	19,23	19,84	20,68	20,97				
		Pembangunan Jalan Kualitas Beton Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk gresik					Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	0,029	0,764	0,767	0,767	0,772	0,774				
								Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan (%)	75	75	75	75	75	75				
			1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara (KM)	55,83	31,27	34,07	34,84	35,98	36,16					
						1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	8	9,16	12,33	12,2	12,35	11,48					
						1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,5	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5					
						1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	21,6	2	1	1,2	1,35	1,5					
						1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	21,6	2	1	1,2	1,35	1,5					

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Dinas PUTR tidak bersinggungan secara langsung namun hanya dalam hilirisasi pembangunan nasional seperti ikut serta berkoordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan upaya yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU).

Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

sub kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 4. 5 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Asta Cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri											
Outcome Prioritas : Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air											
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	7 unit	2.190.435.626,6	7 unit	2.255.398.828,06	7 unit	2.338.220.207,82	7 unit	2.455.358.206,73	7 unit	2.455.358.206,73	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	177.892.943,84	8 lembaga	183.168.832,81	8 lembaga	189.895.046,94	9 lembaga	199.408.233,81	9 lembaga	199.408.233,81	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2 unit	1.027.163.571,48	2 unit	1.057.627.116,35	2 unit	1.096.463.794,98	2 unit	1.151.394.415,3	2 unit	1.151.393.717,16	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	50 km	10.000.000.000	50 km	10.687.841.990,87	50 km	10.000.000.000	53 km	11.100.497.600,49	53 km	12.093.412.298,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	7 dokumen	1.508.100.871,14	7 dokumen	1.552.827.618,43	7 dokumen	1.609.849.606,86	7 dokumen	1.690.498.367,35	7 dokumen	1.690.498.367,35	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	7 unit	2.908.981.111,94	7 unit	2.595.254.693,11	7 unit	3.105.244.608,44	7 unit	3.260.808.288,17	7 unit	3.260.808.288,17	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1 unit	941.326.789,16	1 unit	1.006.598.624,83	1 unit	1.043.562.325,41	1 unit	1.095.841.748,08	1 unit	1.095.841.748,08	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,92 km	2.626.278.033,32	0,92 km	2.704.167.301,96	0,92 km	3.319.530.073,01	0,92 km	2.943.913.641,63	0,92 km	2.943.913.641,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 km	4.861.171.750,94	12 km	5.005.342.744,13	12 km	5.189.145.886,65	12,5 km	5.449.106.930,17	12,5 km	5.449.106.930,17	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	11 dokumen	1.808.367.301,58	11 dokumen	1.861.999.249,45	11 dokumen	1.930.374.449,89	11 dokumen	2.027.080.568,27	11 dokumen	2.027.080.568,27	SUMBER DAYA AIR

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Asta Cita : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
Outcome Prioritas : Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang											
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	7 unit	2.190.435.626,6	7 unit	2.255.398.828,06	7 unit	2.338.220.207,82	7 unit	2.455.358.206,73	7 unit	2.455.358.206,73	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	177.892.943,84	8 lembaga	183.168.832,81	8 lembaga	189.895.046,94	9 lembaga	199.408.233,81	9 lembaga	199.408.233,81	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2 unit	1.027.163.571,48	2 unit	1.057.627.116,35	2 unit	1.096.463.794,98	2 unit	1.151.394.415,3	2 unit	1.151.393.717,16	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	50 km	10.000.000.000	50 km	10.687.841.990,87	50 km	10.000.000.000	53 km	11.100.497.600,49	53 km	12.093.412.298,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	7 dokumen	1.508.100.871,14	7 dokumen	1.552.827.618,43	7 dokumen	1.609.849.606,86	7 dokumen	1.690.498.367,35	7 dokumen	1.690.498.367,35	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	7 unit	2.908.981.111,94	7 unit	2.595.254.693,11	7 unit	3.105.244.608,44	7 unit	3.260.808.288,17	7 unit	3.260.808.288,17	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1 unit	941.326.789,16	1 unit	1.006.598.624,83	1 unit	1.043.562.325,41	1 unit	1.095.841.748,08	1 unit	1.095.841.748,08	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,92 km	2.626.278.033,32	0,92 km	2.704.167.301,96	0,92 km	3.319.530.073,01	0,92 km	2.943.913.641,63	0,92 km	2.943.913.641,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 km	4.861.171.750,94	12 km	5.005.342.744,13	12 km	5.189.145.886,65	12,5 km	5.449.106.930,17	12,5 km	5.449.106.930,17	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	11 dokumen	1.808.367.301,58	11 dokumen	1.861.999.249,45	11 dokumen	1.930.374.449,89	11 dokumen	2.027.080.568,27	11 dokumen	2.027.080.568,27	SUMBER DAYA AIR
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	4 dokumen	1.000.000.000	5 dokumen	1.250.000.000	5 dokumen	1.550.000.000	6 dokumen	1.900.000.000	6 dokumen	2.300.000.000	BINA MARGA

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20 dokumen	4.000.000.000	22 dokumen	4.300.000.000	23 dokumen	4.700.000.000	25 dokumen	5.200.000.000	25 dokumen	6.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.000 km	2.000.000.000	1.000 km	2.275.000.000	1.000 km	2.500.000.000	1.000 km	3.000.000.000	1.000 km	3.500.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	17,1 km	35.200.000.000	17,5 km	41.430.914.927	18 km	43.000.000.000	18,5 km	47.000.000.000	19 km	47.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	9,16 km	116.449.771.792	12,33 km	141.007.744.073	12,2 km	115.972.931.000	12,35 km	100.044.827.000	11,48 km	128.451.037.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	0,8 km	3.000.000.000	0,82 km	3.200.000.000	0,82 km	3.500.000.000	0,85 km	4.500.000.000	0,85 km	5.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	0,81 km	3.500.000.000	0,82 km	3.200.000.000	0,82 km	3.500.000.000	0,83 km	4.000.000.000	0,83 km	4.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	6 meter	1.200.000.000	7 meter	1.300.000.000	8 meter	1.400.000.000	8 meter	1.500.000.000	9 meter	1.600.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	1,4 km	8.000.000.000	1,6 km	10.000.000.000	1,8 km	12.000.000.000	2,1 km	17.000.000.000	2,5 km	20.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	3 jembatan	1.500.000.000	3 jembatan	1.520.000.000	3 jembatan	1.550.000.000	3 jembatan	1.600.000.000	3 jembatan	1.600.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	2 km	28.411.774.208	1 km	10.000.000.000	1,2 km	12.000.000.000	1,35 km	17.000.000.000	1,5 km	20.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	10 meter	18.000.000.000	10 meter	8.000.000.000	10 meter	8.500.000.000	10 meter	9.000.000.000	10 meter	9.000.000.000	BINA MARGA
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	132.906.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	250.300.000	2 dokumen	255.118.000	2 dokumen	248.552.000	2 dokumen	255.000.000	2 dokumen	265.000.000	TATA RUANG

SUB KEGIATAN	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	580.000.000	2 dokumen	600.000.000	2 dokumen	630.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	204.127.000	1 dokumen	182.488.000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	2 kasus	200.000.000	2 kasus	200.000.000	2 kasus	230.000.000	2 kasus	220.000.000	2 kasus	230.000.000	TATA RUANG
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	50.256.000	2 dokumen	51.747.000	2 dokumen	53.647.000	2 dokumen	56.335.000	2 dokumen	60.000.000	PERTANA HAN
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	41.721.392.000	4 dokumen	42.958.751.000	4 dokumen	44.536.256.000	4 dokumen	46.767.392.000	4 dokumen	48.195.143.000	PERTANA HAN

4.5 Sub kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Kabupaten Gresik salah satunya berfokus pada pengembangan pusat perekonomian nasional yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pelebaran Jalan pada wilayah Kecamatan Manyar sekitar JIPE. Dinas PUTR tidak memberikan dukungan secara langsung namun hanya berkontribusi melalui keikutsertaan dalam berkoordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Tabel 4. 6 Tabel Dukungan Proyek Strategis Nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis DPUTR

Sub kegiatan dukungan terhadap Asta Cita dalam Rencana Strategis DPUTR merupakan rangkaian kegiatan operasional yang secara langsung mendukung pencapaian delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal sebagai Asta Cita. Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sub kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat penyediaan infrastruktur dasar yang layak, merata, dan berkelanjutan, serta mendorong tata ruang yang mendukung pertumbuhan wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Contohnya meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengelolaan sumber daya air, pengadaan lahan, hingga penyusunan dan penegakan rencana tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan Asta Cita ke dalam setiap sub kegiatan, DPUTR memastikan bahwa pelaksanaan program kerja tidak hanya memenuhi target teknis, tetapi juga mendukung pencapaian visi pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Tabel 4.7 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis DPUTR

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri											
Outcome Prioritas : Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air											
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	7 unit	2.190.435.626,6	7 unit	2.255.398.828,06	7 unit	2.338.220.207,82	7 unit	2.455.358.206,73	7 unit	2.455.358.206,73	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	177.892.943,84	8 lembaga	183.168.832,81	8 lembaga	189.895.046,94	9 lembaga	199.408.233,81	9 lembaga	199.408.233,81	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2 unit	1.027.163.571,48	2 unit	1.057.627.116,35	2 unit	1.096.463.794,98	2 unit	1.151.394.415,3	2 unit	1.151.393.717,16	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	50 km	10.000.000.000	50 km	10.687.841.990,87	50 km	10.000.000.000	53 km	11.100.497.600,49	53 km	12.093.412.298,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	7 dokumen	1.508.100.871,14	7 dokumen	1.552.827.618,43	7 dokumen	1.609.849.606,86	7 dokumen	1.690.498.367,35	7 dokumen	1.690.498.367,35	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	7 unit	2.908.981.111,94	7 unit	2.595.254.693,11	7 unit	3.105.244.608,44	7 unit	3.260.808.288,17	7 unit	3.260.808.288,17	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1 unit	941.326.789,16	1 unit	1.006.598.624,83	1 unit	1.043.562.325,41	1 unit	1.095.841.748,08	1 unit	1.095.841.748,08	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,92 km	2.626.278.033,32	0,92 km	2.704.167.301,96	0,92 km	3.319.530.073,01	0,92 km	2.943.913.641,63	0,92 km	2.943.913.641,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 km	4.861.171.750,94	12 km	5.005.342.744,13	12 km	5.189.145.886,65	12,5 km	5.449.106.930,17	12,5 km	5.449.106.930,17	SUMBER DAYA AIR

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	11 dokumen	1.808.367.301,58	11 dokumen	1.861.999.249,45	11 dokumen	1.930.374.449,89	11 dokumen	2.027.080.568,27	11 dokumen	2.027.080.568,27	SUMBER DAYA AIR
Asta Cita : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
Outcome Prioritas : Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang											
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	7 unit	2.190.435.626,6	7 unit	2.255.398.828,06	7 unit	2.338.220.207,82	7 unit	2.455.358.206,73	7 unit	2.455.358.206,73	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	177.892.943,84	8 lembaga	183.168.832,81	8 lembaga	189.895.046,94	9 lembaga	199.408.233,81	9 lembaga	199.408.233,81	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2 unit	1.027.163.571,48	2 unit	1.057.627.116,35	2 unit	1.096.463.794,98	2 unit	1.151.394.415,3	2 unit	1.151.393.717,16	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	50 km	10.000.000.000	50 km	10.687.841.990,87	50 km	10.000.000.000	53 km	11.100.497.600,49	53 km	12.093.412.298,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	7 dokumen	1.508.100.871,14	7 dokumen	1.552.827.618,43	7 dokumen	1.609.849.606,86	7 dokumen	1.690.498.367,35	7 dokumen	1.690.498.367,35	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	7 unit	2.908.981.111,94	7 unit	2.595.254.693,11	7 unit	3.105.244.608,44	7 unit	3.260.808.288,17	7 unit	3.260.808.288,17	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1 unit	941.326.789,16	1 unit	1.006.598.624,83	1 unit	1.043.562.325,41	1 unit	1.095.841.748,08	1 unit	1.095.841.748,08	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,92 km	2.626.278.033,32	0,92 km	2.704.167.301,96	0,92 km	3.319.530.073,01	0,92 km	2.943.913.641,63	0,92 km	2.943.913.641,63	SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	12 km	4.861.171.750,94	12 km	5.005.342.744,13	12 km	5.189.145.886,65	12,5 km	5.449.106.930,17	12,5 km	5.449.106.930,17	SUMBER DAYA AIR

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	11 dokumen	1.808.367.301,58	11 dokumen	1.861.999.249,45	11 dokumen	1.930.374.449,89	11 dokumen	2.027.080.568,27	11 dokumen	2.027.080.568,27	SUMBER DAYA AIR
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	4 dokumen	1.000.000.000	5 dokumen	1.250.000.000	5 dokumen	1.550.000.000	6 dokumen	1.900.000.000	6 dokumen	2.300.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20 dokumen	4.000.000.000	22 dokumen	4.300.000.000	23 dokumen	4.700.000.000	25 dokumen	5.200.000.000	25 dokumen	6.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.000 km	2.000.000.000	1.000 km	2.275.000.000	1.000 km	2.500.000.000	1.000 km	3.000.000.000	1.000 km	3.500.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	17,1 km	35.200.000.000	17,5 km	41.430.914.927	18 km	43.000.000.000	18,5 km	47.000.000.000	19 km	47.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	9,16 km	116.449.771.792	12,33 km	141.007.744.073	12,2 km	115.972.931.000	12,35 km	100.044.827.000	11,48 km	128.451.037.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	0,8 km	3.000.000.000	0,82 km	3.200.000.000	0,82 km	3.500.000.000	0,85 km	4.500.000.000	0,85 km	5.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	0,81 km	3.500.000.000	0,82 km	3.200.000.000	0,82 km	3.500.000.000	0,83 km	4.000.000.000	0,83 km	4.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	6 meter	1.200.000.000	7 meter	1.300.000.000	8 meter	1.400.000.000	8 meter	1.500.000.000	9 meter	1.600.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	1,4 km	8.000.000.000	1,6 km	10.000.000.000	1,8 km	12.000.000.000	2,1 km	17.000.000.000	2,5 km	20.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	3 jembatan	1.500.000.000	3 jembatan	1.520.000.000	3 jembatan	1.550.000.000	3 jembatan	1.600.000.000	3 jembatan	1.600.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	2 km	28.411.774.208	1 km	10.000.000.000	1,2 km	12.000.000.000	1,35 km	17.000.000.000	1,5 km	20.000.000.000	BINA MARGA
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	10 meter	18.000.000.000	10 meter	8.000.000.000	10 meter	8.500.000.000	10 meter	9.000.000.000	10 meter	9.000.000.000	BINA MARGA

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		BIDANG
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	132.906.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	250.300.000	2 dokumen	255.118.000	2 dokumen	248.552.000	2 dokumen	255.000.000	2 dokumen	265.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	580.000.000	2 dokumen	600.000.000	2 dokumen	630.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	80.000.000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	204.127.000	1 dokumen	182.488.000	TATA RUANG
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	2 kasus	200.000.000	2 kasus	200.000.000	2 kasus	230.000.000	2 kasus	220.000.000	2 kasus	230.000.000	TATA RUANG
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	50.256.000	2 dokumen	51.747.000	2 dokumen	53.647.000	2 dokumen	56.335.000	2 dokumen	60.000.000	PERTANAHAN
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	41.721.392.000	4 dokumen	42.958.751.000	4 dokumen	44.536.256.000	4 dokumen	46.767.392.000	4 dokumen	48.195.143.000	PERTANAHAN

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPUTR

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) merupakan indikator kunci yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan strategis dalam kurun waktu perencanaan.

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DPUTR Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks risiko bencana	Indeks	91,42	135.90-132.58	132.58-129.42	129.42-126.42	126.42-123.55	123.55-120.79	120.79-117.17	123.55-120.79
2	Rasio Government Expenditure	%	1,91	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,15
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,73	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,25	4,15
4	Indeks Infrastruktur	Angka	61,62	63,32	67,86	69,07	70,48	71,57	72,66	71,57
I.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	%	72,88	73	74	75	76	77	78	77
2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	%	70,74	70,94	70,29	70,54	70,79	71,04	71,29	71,04
3	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	%	69,86	69,48	69,58	69,68	69,78	69,88	69,98	69,88
4	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	49,85	50,47	51,09	51,71	52,33	52,95	53,58	52,95
5	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	%	65,86	66,37	66,88	67,39	67,9	68,42	68,94	68,42
6	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	%	3,12	9,82	22,77	26,34	36,16	42,86	49,56	42,86
7	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	1,34	3,33	5,32	7,31	9,3	11,29	13,27	11,29
II.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
8	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	%	50	60	60	60	60	60	60	60

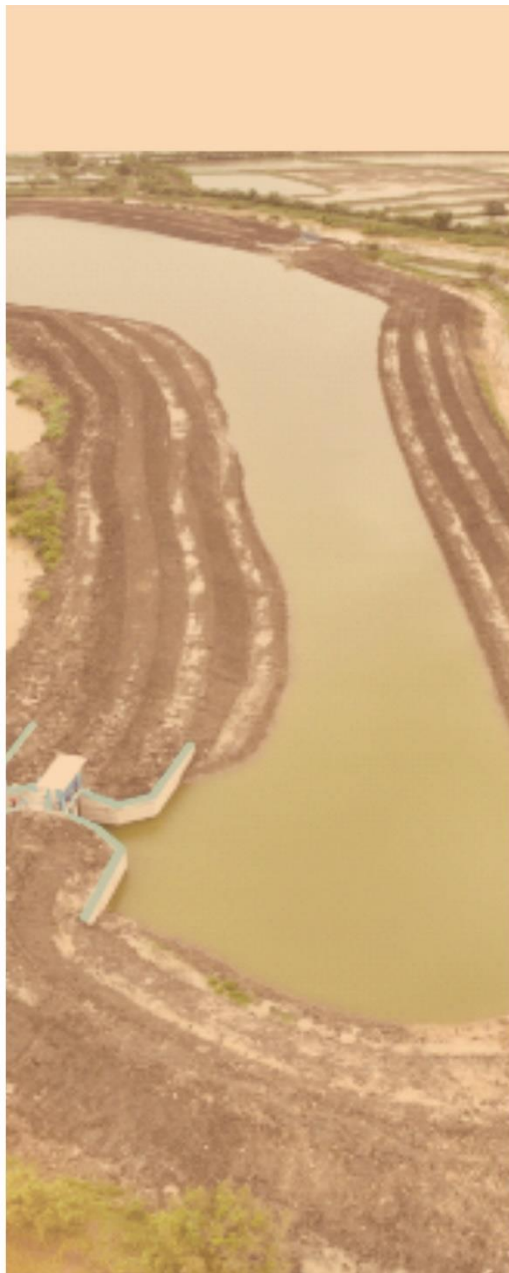
4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra DPUTR

Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra DPUTR merupakan ukuran strategis yang menunjukkan sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas nasional maupun daerah. IKK dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan utama DPUTR tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga memberikan dampak nyata (outcome) terhadap pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai rencana tata ruang. Target IKK biasanya dinyatakan dalam bentuk capaian terukur, seperti persentase kemandapan jalan kabupaten dan jalan poros desa, persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten, Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong, Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan, dan Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan yang harus dicapai dalam periode Renstra. Keberhasilan pencapaian target IKK menjadi cerminan efektivitas pelaksanaan program prioritas serta dasar pertanggungjawaban kinerja instansi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Tabel 4.9 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra DPUTR Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	%	6,41	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
2	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	%	7,43	8,77	8,77	8,77	8,77	9,11	9,11
3	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air	%	89	80	80	80	80	80	80
4	Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong	Angka	2	2	2	2	2	2	2
5	Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun	%	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
6	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	%	10,31	33,68	17,6	19,23	19,84	20,68	20,97
7	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa	%	0,021	0,029	0,764	0,767	0,767	0,772	0,774

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan	%	72	75	75	75	75	75	75
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha	%	108,6	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang	%	0,8	1,61	2,41	3,21	4,02	4,82	5,62
11	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	53,45	60	60	60	60	60	60
12	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	8,33	10	10	10	10	10	10
13	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	%	1,56	20	25	30	35	40	45



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

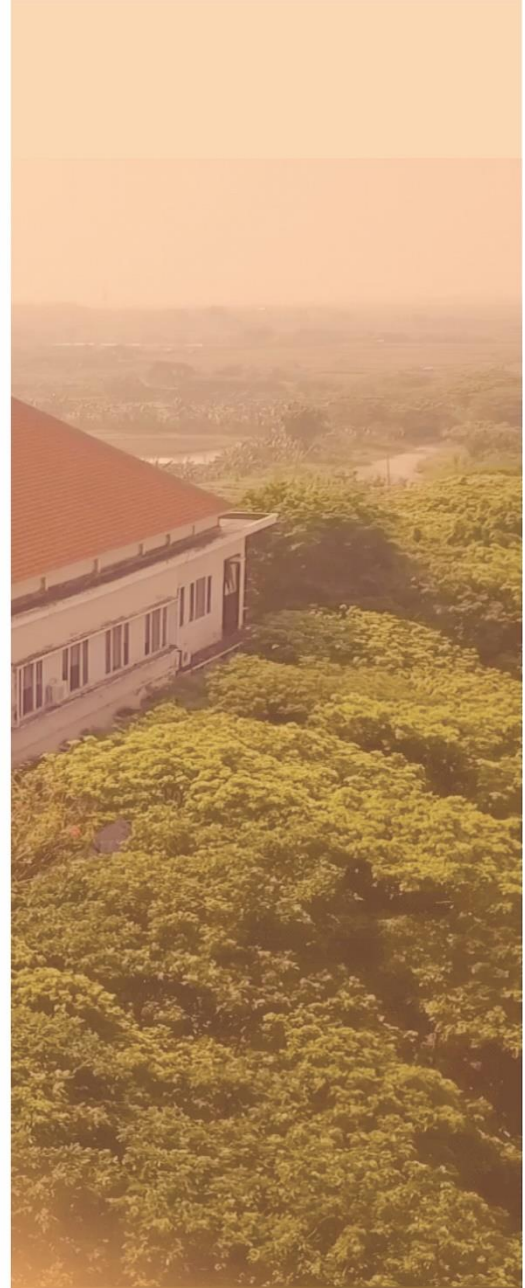
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja yang terukur sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Melalui Renstra ini, Dinas PUTR bertekad untuk mewujudkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta penataan ruang yang tertib dan mendukung pengembangan wilayah secara menyeluruh. Seluruh perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini akan dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam masa pelaksanaan lima tahun kedepan apabila ada kebijakan yang berubah maka Renstra ini dapat dievaluasi baik program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator maupun target kinerja sesuai kondisi fiskal daerah.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun mitra kerja lainnya. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Akhirnya, dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam menjalankan peran strategisnya. Semoga upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun mendatang dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan daerah yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.



LAMPIRAN MANUAL INDIKATOR

Lampiran 1. MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN

INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN						TIPE PERHITUNGAN	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
SS 1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah									
Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	73%	74%	75%	75%	77%	78%	Non Kumulatif, dihitung Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Rata-rata realisasi anggaran program sumber daya air ditambah program penyelenggaraan jalan dibagi rata-rata anggaran program sumber daya air ditambah program penyelenggaraan jalan yang ditetapkan dalam APBD tiga tahun terakhir kali seratus persen	Laporan Keuangan
SS 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat									
Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	(74.369,56 / 147.356,00) = 50,47%	(75.282,15 / 147.356,00) = 51,09%	(76.194.75 / 147.356,00) = 51,71%	(77.107,34 / 147.356,00) = 52,33%	(78.029,05 / 147.356,00) = 52,95%	(78.959.99 / 147.356,00) = 53,58%	Kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Meter) dibagi Total Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten (Meter) kali seratus persen	Hasil Survey
Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	(11.196.466,86 / 16.869.680,00) x 100% = 66,37 %	(11.282.562,48 / 16.869.680,00) x 100% = 66,88 %	(11.368.658,09 / 16.869.680,00) x 100% = 67.39 %	(11.454.753,70 / 16.869.680,00) x 100% = 67,90 %	(11.541.710,27 / 16.869.680,00) x 100% = 68,42 %	(11.629.536,40 / 16.869.680,00) x 100% = 68,94 %	Kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Volume Daya Tampung Waduk Kab (Meter kubik) dibagi Volume Daya Tampung Kapasitas Waduk (Kapasitas Ideal) (Meter kubik) kali seratus persen	Hasil Survey
Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	14,29% + 0% + 12,50% + 12,50% / 4 = 9,82%	(14,29% + 12,50% + 12,50% + 12,50% / 4) + 9,82 = 22,77%	(14,29% + 0% + 0% + 0% / 4) +22,77% = 26,34%	(14,29% + 0% +12,50% + 12,50% / 4) + 26,34% = 36,16%	(14,29% + 12,50% + 0% + 0% / 4) + 36,16% = 42,86%	(14,29% + 0% + 0% + 12,50% / 4) +42,86% = 49,55%	Kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	*) persentase capaian normalisasi sungai ditambah persentase capaian Pembangunan retarding basin ditambah persentase capaian Pengadaan Lahan ditambah persentase capaian Perencanaan Retarding Basin dibagi empat kegiatan ditambah persentase capaian N-1	Hasil Survey
SS 3. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan									
Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	(401,93 / 566,61) x 100% = 70,936 %	(407,011 / 579,014) x 100% = 70,294%	(408,459 / 579,014) x 100% = 70,544%	(409,906 / 579,014) x 100% = 70,794%	(411,354 / 579,014) x 100% = 71,044%	(412,801 / 579,014) x 100% = 71,294%	Kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	(Kondisi Jalan Baik ditambah Sedang) Jalan Kabupaten (kilometer) dibagi Panjang Total Jalan Kabupaten(kilometer) kali seratus persen	Hasil Survey

INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN						TIPE PERHITUNGAN	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa	$(297,800 / 428,607) \times 100\% = 69,481\%$	$(298,229 / 428,607) \times 100\% = 69,581\%$	$(298,657 / 428,607) \times 100\% = 69,681\%$	$(298,657 / 428,607) \times 100\% = 69,781\%$	$(299,514 / 428,607) \times 100\% = 69,881\%$	$(299,943 / 428,607) \times 100\% = 69,981\%$	Kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Kondisi Jalan Baik ditambah Sedang Jalan Poros Desa (kilometer) dibagi Panjang Total Jalan Poros Desa (kilometer) kali seratus persen	hasil Survey
SS 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah									
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$4.183 / 125.676 \times 100\% = 3,33\%$	$6.683 / 125.676 \times 100\% = 5,32\%$	$9.183 / 125.676 \times 100\% = 7,31\%$	$11.683 / 125.676 \times 100\% = 9,30\%$	$14.183 / 125.676 \times 100\% = 11,29\%$	$16.683 / 125.676 \times 100\% = 13,27\%$	Kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Luas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (Ha) dibagi Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang (Ha) kali seratus persen	Jumlah Pemohon pemanfaatan Ruang
Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan	$3 / 5 \times 100\% = 60\%$	$3 / 5 \times 100\% = 60\%$	$3 / 5 \times 100\% = 60\%$	$3 / 5 \times 100\% = 60\%$	$3 / 5 \times 100\% = 60\%$	$3 / 5 \times 100\% = 60\%$	Non kumulatif, dihitung setiap tahun	Jumlah lokasi yang dibebaskan dibagi Jumlah lokasi yang direncanakan kali seratus persen	Hasil laporan

Ket : *)

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
Normalisasi sungai dan anak sungai	50	50	50	50	50	50	Panjang Sungai Dan Anak Sungai Yang Dinormalisasi Setiap Tahun (KM)
	350	350	350	350	350	350	Total Panjang Sungai Dan Anak Sungai (KM)
	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	Persentase Capaian Normalisasi Sungai Per Tahun (%)
Pembangunan retarding basin	0	1			1		Retarding Basin Yang Dibangun Tiap Tahun (Unit)
	8	8			8		Total Retarding Basin Yang Direncanakan (Unit)
	0	12,50			12,50		
Pengadaan Lahan	1	1		1			Pengadaan Lahan Retarding Basin (Lokasi)
	8	8		8			Pengadaan Lahan Retarding Basin Yang Direncanakan (Lokasi)
	12,50	12,50		12,50			
Perencanaan Retarding	1	1		1		1	Dokumen Perencanaan Retarding Basin Yang Disusun (Dokumen)
	8	8		8		8	Dokumen Perencanaan Retarding Basin Yang Direncanakan (Dokumen)
	12,50	12,50		12,50		12,50	
Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong	9,82	22,77	26,34	36,16	42,86	49,55	Persentase Capaian Normalisasi Sungai + Persentase Capaian Pembangunan Retarding Basin + Persentase Capaian Pengadaan Lahan + Persentase Capaian Perencanaan Retarding Basin / 4 Kegiatan

Lampiran 2. MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya sasaran strategis OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	Persen	60	60	60	60	60	60	Persentase Capaian Monev Renja Setiap Tahun	Non kumulatif, dihitung Rata-Rata pencapaian setiap tahun	Monev Renja
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR	Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dokumen	30	43	43	43	43	43	Dihitung Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	13	13	13	13	13	Dihitung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	20	20	20	20	20	Dihitung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	10	10	10	10	10	Dihitung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah ASN yang ada	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang / bulan	103	118	118	118	118	118	Dihitung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tunjangan ASN	ASN	Tunjangan ASN								Tunjangan ASN		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8	8	8	8	8	8	Dihitung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen klasifikasi aset	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dokumen	1	1	6	6	6	6	Dihitung Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6	6	6	6	Dihitung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis	36	36	36	36	36	36	Dihitung Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	3	3	3	3	Dihitung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	3	3	3	3	Dihitung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	3	3	4	5	6	Dihitung Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	0	3	3	3	6	6	Dihitung Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	1	1	2	2	2	Dihitung Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	20	20	20	20	20	20	Dihitung Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	4	4	4	Dihitung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	7	7	7	7	Dihitung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9	9	9	9	9	Dihitung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit	340	340	340	340	340	340	Dihitung Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	22	22	22	22	Dihitung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	25	25	30	30	30	30	Dihitung Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	200	220	220	220	220	Dihitung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	Unit	3	3	3	3	3	3	Dihitung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan pemanfaatan air yang optimal dan berkelanjutan, serta pengurangan dampak bencana banjir	Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air	Persen	80	80	80	80	80	80	Realisasi anggaran Sumber daya Air Tahun Berkenaan / Pagu anggaran Sumber Daya Air Tahun Berkenaan x 100%	Non kumulatif, dihitung Rata-Rata pencapaian setiap tahun	Internal
		Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	$(9/156) \times 100\% = 5,77\%$	$(9/156) \times 100\% = 5,77\%$	$(9/156) \times 100\% = 5,77\%$	$(9/156) \times 100\% = 5,77\%$	$(9/156) \times 100\% = 5,77\%$	$(9/156) \times 100\% = 5,77\%$	(jumlah Waduk Yang Dinormalisasi/Jumlah Waduk Kabupaten) x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
		Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	$(12.920/147.356) \times 100\% = 8,77\%$	$(12.920/147.356) \times 100\% = 8,77\%$	$(12.920/147.356) \times 100\% = 8,77\%$	$(12.920/147.356) \times 100\% = 8,77\%$	$(13420/147356) \times 100\% = 9,11\%$	$(13420/147356) \times 100\% = 9,11\%$	(Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara dan Direhabilitasi/Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten) x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
		Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun	Persen	$50/350 \times 100\% = 14,29\%$	$50/350 \times 100\% = 14,29\%$	$50/350 \times 100\% = 14,29\%$	$50/350 \times 100\% = 14,29\%$	$50/350 \times 100\% = 14,29\%$	$50/350 \times 100\% = 14,29\%$	(panjang sungai dan anak sungai yang dinormalisasi / total panjang sungai dan anak sungai) x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
		Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong	Angka	2	2	2	2	2	2	menghitung tahapan kesiapan retarding basin	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	$(256.59/350) \times 100\% = 73,31\%$	$(263.6/350) \times 100\% = 75,31\%$	$(270.6/350) \times 100\% = 77,31\%$	$(277.6/350) \times 100\% = 79,32\%$	$(284.6/350) \times 100\% = 81,32\%$	$(291.6/350) \times 100\% = 81,32\%$	Panjang saluran pembuang kondisi baik (Km) /total Panjang Saluran pembuang (Km) x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	7	7	Dihitung Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	8	8	8	8	9	9	Dihitung Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kilometer	50	50	50	50	53	53	Dihitung Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	7	7	7	7	7	7	Dihitung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	7	7	Dihitung Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi setiap tahun	Meter	12.920	12.920	12.920	12.920	13.420	13.420	Dihitung panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi dalam setahun	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kilometer	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	Dihitung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kilometer	12	12	12	12	12,5	12,5	Dihitung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang	Dokumen	11	11	11	11	11	11	Dihitung Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Rawa	Rawa	Disusun								Disusun		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya akseibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Persen	(55,830 / 165,764) x 100% = 33,680%	(30,27 / 172,003) x 100% = 17,598%	(33,07 / 172,003) x 100% = 19,226%	(33,84 / 170, 555) x 100% = 19,841%	(34,98 / 169,108) x 100% = 20,685%	(35,16 / 167,602) x 100% = 20,978 %	(Kondisi Jalan Baik + Sedang) / Panjang Total Jalan Kabupaten x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
		Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa	Persen	(1,000 / 130,807) x 100% = 0,764 %	(1,000 / 130,807) x 100% = 0,764 %	(1,000 / 130,378) x 100% = 0,767 %	(1,000 / 130,378) x 100% = 0,767 %	(1,000 / 129,521) x 100% = 0,772 %	(1,000 / 129,093) x 100% = 0,774 %	(Kondisi Jalan Baik + Sedang) / Panjang Total Jalan Poros Desa x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
		Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan	Persen	75	75	75	75	75	75	Realisasi anggaran Penyelenggaraan jalan Tahun Berkenaan / Pagu anggaran Penyelenggaraan Jalan Tahun Berkenaan x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	Kilometer	55,83	31,27	34,07	34,84	35,98	36,16	Dihitung panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara dalam setahun	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	3	4	5	5	6	6	Dihitung Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	34	20	22	23	25	25	Dihitung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kilometer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Dihitung Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kilometer	21,91	17,1	17,5	18	18,5	19	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Kilometer	8	9,16	12,33	12,2	12,35	11,48	Dihitung Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kilometer	1,5	0,8	0,82	0,82	0,85	0,85	Dihitung Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kilometer	2,32	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	1	6	7	8	8	9	Dihitung Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kilometer	0,5	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	Dihitung Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	15	3	3	3	3	3	Dihitung Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Kilometer	21,6	2	1	1,2	1,35	1,5	Dihitung Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	6	10	10	10	10	10	Dihitung Panjang jembatan yang dibangun	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha	Persen	$(1300 / 1300) \times 100\% = 100\%$	$(1300 / 1300) \times 100\% = 100\%$	$(1200 / 1200) \times 100\% = 100\%$	$(1100 / 1100) \times 100\% = 100\%$	$(1000 / 1000) \times 100\% = 100\%$	$900 / 900 \times 100\% = 100\%$	(Jumlah Draft KKPR Berusaha dan Non Berusaha / Target Draft KKPR Berusaha dan Non Berusaha pada tahun N) x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang	Persen	$(200 / 12.448,026) \times 100\% = 1,61\%$	$(300 / 12.448,026) \times 100\% = 2,41\%$	$(400 / 12.448,026) \times 100\% = 3,21\%$	$(500 / 12.448,026) \times 100\% = 4,02\%$	$(600 / 12.448,026) \times 100\% = 4,82\%$	$(700 / 12.448,026) \times 100\% = 5,62\%$	(Luas ruang industri yang sudah dimanfaatkan (Ha) / Luas keseluruhan ruang industri yang tersedia di RTRW (Ha)) x 100%	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Dalam Proses Legalisasi	Dokumen	6	6	7	8	8	8	Dihitung jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Dalam Proses Legalisasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	7	7	7	8	8	8	Dihitung jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Tata Ruang	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	jawab Masyarakat	Masyarakat								Masyarakat		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dihitung jumlah dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dihitung jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dihitung Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Non kumulatif, Tahunan	Internal
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persen	10	10	10	10	10	10	(Jumlah Sengketa tanah yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Sengketa yang difasilitasi) x 100%	Non kumulatif, Tahunan (target yang difasilitasi 10 pengaduan per tahun)	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya sengketa tanah garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	Sengketa	2	2	2	2	2	2	Dihitung jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	Non kumulatif, Tahunan	Internal
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Dihitung Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Non kumulatif, Tahunan	Internal
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	20	25	30	35	40	45	(Luas bidang tanah yang dibebaskan / Luas rencana bidang tanah yang akan dibebaskan) x 100%	Non kumulatif, Tahunan	Internal
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasinya pembebasan lahan	Luas lahan yang dibebaskan	Meter Persegi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Dihitung luas lahan yang dibebaskan	Non kumulatif, Tahunan	Internal
2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	4	0	0	0	0	0	Dihitung Jumlah Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Non kumulatif, Tahunan	Internal
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Dihitung Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.0.00.0.00.00.0004 - UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean												
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang Wilayah Bawean			17	17	17	17	17	17			Internal
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	17	17	17	17	17	17	Dihitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan di Wilayah Bawean			68	68	68	68	68	68			Internal
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kilometer	68	68	68	68	68	68	Dihitung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.0.00.0.00.00.0002 - UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan												
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya normalisasi Saluran Pembuang Wilayah Selatan			64	64	64	64	64	64			Internal
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	64	64	64	64	64	64	Dihitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan Wilayah Selatan			158	158	158	158	158	158			Internal
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kilometer	158	158	158	158	158	158	Dihitung Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.0.00.0.00.00.0003 - UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara												
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik di Wilayah Utara			30	30	30	30	30	30			Internal
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	30	30	30	30	30	30	Dihitung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Non kumulatif, Tahunan	Internal
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan di Wilayah Utara			12	12	30	30	30	30			Internal
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kilometer	12	12	30	30	30	30	Dihitung Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Non kumulatif, Tahunan	Internal



DPUTR

rengram